

**UPAYA WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) DALAM MENANGKAT
ISU DISKRIMINASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP MUSLIM
UYGHUR DI XINJIANG**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

ANISA ZAKIYA

15323038

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**UPAYA *WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC)* DALAM MENGGANGKAT
ISU DISKRIMINASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP MUSLIM
UYGHUR DI XINJIANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hubungan Internasional
Pada Program Strata 1 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Oleh :

ANISA ZAKIYA

15323038

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

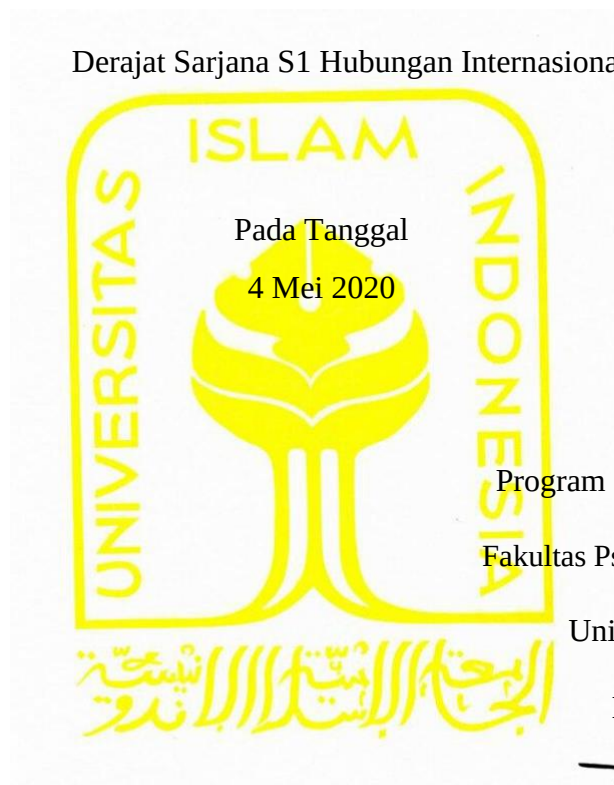
2020

**UPAYA WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC) DALAM MENGANGKAT
DISKRIMINASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP MUSLIM
UYGHUR DI XINJIANG**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

1. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A
2. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, M.A.

Tanda Tangan

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Anisa Zakiya
No. Mahasiswa : 15323038
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Upaya *World Uyghur Congress (WUC)* dalam
Mengangkat Diskriminasi Pemerintah Tiongkok terhadap
Muslim Uyghur Di Xinjiang

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang menyatakan,



Anisa Zakiya

HALAMAN PERSEMBAHAN



Terima kasih Ya Allah atas segala yang Engkau hadirkan untuk memberikan pencerahan dalam hidup ini dan dan Engkau berikan pula berbagai hidayah agar diriku tetap bersyukur atas semua yang telah diberikan.

Terima kasih Ya Allah untuk waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada hambamu yang tidak sempurna ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya ini, sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih kepada mereka yang tercinta, yang selalu memberikan makan dan motivasi dalam menyemangati hidupku

“Kedua Orang Tuaku Tersayang”

Mama dan Papa Tercinta Zainuddin dan Arfianetti Terima kasih mama, papa yang selalu mendorong dan tidak kunjung bosan mengingatkanku untuk terus menyelesaikan tanggung jawabku dan menjadi pribadi yang mandiri. Terima kasih atas setiap doa yang dapat menuntunku bisa berjuang sampai sejauh ini. Aku berharap ini merupakan awal yang tepat dari lika-liku kehidupan tempatku berjuang, dan membuat kalian bangga dan bahagia.

“Uni, Kakak, Abang dan Keponakanku Tercinta”

Kakak Nia, Nipeni, Abang Ari serta para keponakanku yang menggemaskan. Tidak dapat dipungkiri kalianlah faktor yang membentuk pribadi ku sekarang, yang mengajarkanku untuk bersabar dan belajar untuk memikirkan orang lain. Terima kasih atas doa, nasihat dan motivasi selama ini. Terima kasih sudah selalu menjadi tempat untukku mengeluh. Terima kasih juga untuk para bocah-bocah yang selalu menghibur hariku dan memotivasiku untuk cepat menyelesaikan studi ini.

HALAMAN MOTTO

“ Jangan terlalu larut dalam kenyamanan sampai akhirnya
lupa caranya berjalan keluar menghadapi dunia “

“ *A small but certain happiness*, nikmati hidupmu,
berhenti menurunkan kepercayaan dirimu karena
kesuksesan orang lain, dan terutama banggalah akan
kemampuanmu sekecil apapun itu”

“ You don’t have to be EXTREME, just
CONSISTENT”

“ *Life is a sculpture, that you cast as you make mistakes
and learn from them “*

-RM, BTS-

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., selaku pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas segala ilmu, arahan, kesabaran dan motivasi yang telah diberikan. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah dan apa yang telah Bapak lakukan mendapatkan balasan dari Allah STW. Sukses terus buat Pak Enggar dan tetap menjadi dosen terbaik yang menginspirasi banyak orang.
3. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku Kaprodi dan dosen, serta dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Irawan Jati, S.IP., B.Int.St., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., serta seluruh dosen-dosen UII. Terima kasih atas ilmu, arahan dan kesabarannya selama kurang lebih empat tahun ini.

4. Kedua orang tuaku, yang selalu mendoakan dan mendukung untuk terus menimba ilmu dan berjuang. Terima kasih sudah mengajarku mandiri dan belajar tentang kerasnya hidup ini. Terima kasih atas segala pengorbanan kalian untuk menyekolahkan anakmu ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga mama dan papa selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam hidup.
5. Kakak & Uni, yang selalu memanjakanku dan bersabar dalam menghadapiku. Terima kasih sudah menjadi sosok panutan yang mengajarkanku untuk berpikir dewasa dan tidak menjadi individu yang kasar. Karena kalianlah aku memiliki ketertarikan akan bidang studi ini dan memperluas pandanganku soal dunia.
6. Keponakanku, Rafa, Ami, Abyan, Aqlan, Alby, Arsa, Queen, Dira, kalian membuat caraku memandang dunia menjadi kembali bewarna. Kalian mengingatkanku akan simpelnya pemikiran anak-anak dan pentingnya pandangan ini untukku menghadapi dunia. Melalui kalian aku belajar menghargai hal kecil di dunia ini.
7. Sarah & Nut, sampai sekarang kalian teman yang masih nempel. Walaupun sifat kita sangat berbeda namun kalian memberikan pengalaman dan motivasi berharga dalam hidupku. Kalian mengajarkanku untuk lebih percaya diri dan terus berjuang keras dalam menjalankan suatu tugas dan kewajiban. Salut untuk kalian.
8. Viola & Nita, teman seperjuanganku di Jogja yang selalu jalan-jalan dan nongkrong bersama. Kalian mengajarkanku untuk lebih santai dalam hidup ini. Berkat kalian aku bisa bertahan dan nyaman tinggal di Jogja. Semangat untuk kita tim *slow* yang selalu nongkrong ngerjain skripsi di Burjo mahal

9. Teman-teman seangkatanku, kita berjuang bersama, mengerjakan tugas sampai larut malam bersama dan membuat memori bersama. Terima kasih juga Ummu yang sangat membantuku dalam mengerjakan skripsi ini. You're The Best lah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Signifikansi	8
1.5. Cakupan Penelitian	9
1.6. Tinjauan Pustaka	10
1.6.1. Akar Permasalahan Antara Uyghur dan Pemerintah Tiongkok	10
1.6.2. Kebijakan De-ekstremisasi Pemerintah Tiongkok	12
1.6.3. Posisi <i>World Uyghur Congress</i> terhadap etnis Uyghur	14
1.7. Landasan Konsep	16
1.7.1. Aktor dari <i>Transnational Advocacy Network</i>	16
1.7.2. Faktor Pendorong Terbentuknya <i>Transnational Advocacy Network</i>	17
1.7.3. Efek Bumerang	18
1.7.4. Kinerja <i>Transnational Advocacy Network</i>	19
1.7.5. Parameter kesuksesan <i>Transnational Advocacy Network</i>	22

1.8. Metode Penelitian	23
1.8.1. Jenis Penelitian	23
1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian	23
1.8.3. Metode Pengumpul Data	24
1.8.4. Proses Pengumpulan Data	25

BAB II Upaya *World Uyghur Congress* dalam Mengangkat Isu Diskriminasi Uyghur

2.1. Upaya Menekan Pemerintah Tiongkok	28
2.1.1. Kondisi Aktivis dan Organisasi di Xinjiang	28
2.1.2. Implementasi Efek Bumerang	33
2.2. Jaringan Transnasional sebagai Instrumen Promotor Isu	42
2.3. Pentingnya Aktivitas Internasional dalam Memperkuat Jaringan	47
2.3.1. Konferensi dan <i>Workshop</i>	47
2.3.2. Sidang Umum dan Forum Internasional	50
2.3.3. Demonstrasi	52

BAB III Analisis *Transnational Advocacy Network* Terhadap Upaya *World Uyghur Congress*

3.1. Politik Informasi	57
3.1.1. Lancarnya arus informasi	57
3.1.2. Menjalinkan hubungan kerja sama dengan organisasi domestik sebagai sumber informasi	59
3.2. Politik Simbolis	60
3.3. Politik Pengaruh	62
3.3.1. Pengaruh Material	62
3.3.2. Pengaruh Moral	62
3.4. Politik Akuntabilitas	63
3.4.1. Menghentikan Pengawasan Ketat terhadap masyarakat Uyghur	64
3.4.2. Menghormati Hak Kaum Minoritas	65
3.4.3. Kamp Reedukasi yang sesuai dengan standar internasional dan mengadopsi definisi penyiksaan dari <i>Committee Against Torture</i> (CAT)	66

3.4.4. Menghentikan Tindakan <i>Forced Return</i>	69
BAB IV PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran dan Rekomendasi.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Efek Bumerang	19
Grafik 2.1. Efek Bumerang antara WUC, Rezim Internasional & Tiongkok	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Laporan <i>World Uyghur Congress</i>	38
Tabel 2.2. Organisasi yang Berafiliasi dengan <i>World Uyghur Congress</i>	44
Tabel 2.3. Aktivitas <i>World Uyghur Congress</i>	48
Tabel 2.4. Aktivitas <i>World Uyghur Congress</i>	50
Tabel 2.5. Aktivitas <i>World Uyghur Congress</i>	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Lima Contoh Tindakan Ekstremisme.....	63
---	----

DAFTAR SINGKATAN

CAT	: <i>Committee Against Torture</i>
CEDAW	: <i>Committee on the Elimination of Discrimination Against Women</i>
CERD	: <i>Committee on the Elimination of Racial Discrimination</i>
ETNC	: <i>East Turkestan National Centre</i>
EPP	: <i>European People's Party</i>
EU	: <i>European Union</i>
HRW	: <i>Human Right Watch</i>
HRC	: <i>Human Right Council</i>
IGO	: <i>Intergovernmental Organizations</i>
IJOP	: <i>Integrated Joint Operations Platform</i>
NED	: <i>National Endowment for Democracy</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
OHCHR	: <i>Office of The United Nations High Commisioner for Human Rights</i>
PRC	: <i>People's Republic of China</i>
UAA	: <i>Uyghur American Association</i>
UNHRC	: <i>United Nations Human Right Council</i>
UNPO	: <i>Unrepresented Nations and People Representation</i>
UPR	: <i>Universal Periodic Review</i>
WUC	: <i>World Uyghur Congress</i>
XUAR	: <i>Xinjiang Uyghur Autonomous Region</i>

ABSTRAK

Kekhawatiran terhadap ancaman terorisme menjadi alasan negara Tiongkok dalam mengimplementasikan kebijakan anti terorisme di wilayah yang rentan akan ideologi ekstremis. Tiongkok mengklasifikasikan tiga hal yang harus mereka cegah untuk mempertahankan kestabilan negara yaitu, *The Three Evil Forces*, ekstremisme, separatisme, dan terorisme. Pemerintah melarang praktik keagamaan dan kebudayaan yang dianggap dapat memicu lahirnya ideologi ekstremis di Xinjiang. Ketatnya peraturan di Xinjiang menyebabkan banyak masyarakat muslim Uyghur mencoba kabur keluar negeri untuk mencari perlindungan. Xi Jinping di awal pemerintahannya pada 2014 lalu juga telah melaksanakan *Strike Hard Campaign* yang mencakup implementasi kebijakan de-ekstremisasi seperti didirikannya kamp edukasi. Skripsi ini akan menggunakan landasan konseptual *Transnational Advocacy Network* untuk menganalisis upaya *World Uyghur Congress* (WUC) dalam mengangkat isu diskriminasi terhadap etnis muslim Uyghur di Xinjiang. Melalui konferensi, dialog dan *workshop* yang diselenggarakannya WUC telah berupaya secara signifikan dalam menyebarkan kesadaran global dan melatih agen pembela hak asasi manusia yang terampil. Namun di sisi lain, status WUC sebagai organisasi non pemerintah serta jaringan advokasi yang mereka miliki masih belum cukup kuat untuk mendesak Tiongkok untuk menghentikan setiap tindakan yang mendiskriminasi etnis muslim Uyghur.

Kata Kunci : *Uyghur, Diskriminasi, Xinjiang, Tiongkok, Kebijakan De-ekstremisasi, Kedaulatan Negara*

ABSTRACT

The Concerns about the threat of terrorism are the reason for China in implementing anti-terrorism policies in areas that are vulnerable to extremist ideology. China classifies three things that they must prevent to maintain the stability of the country, namely, *The Three Evil Forces*, extremism, separatism and terrorism. The government prohibits religious and cultural practices which are considered to trigger extremist ideologies in Xinjiang. The strict regulation in Xinjiang has caused many Uyghur Muslims to try to escape abroad to seek protection. Xi Jinping at the beginning of his government in 2014 also carried out a *Strike Hard Campaign* which included the implementation of regulation on de-extremization such as the establishment of educational camps. This thesis will use the conceptual basis of the *Transnational Advocacy Network* to analyze the role of the *World Uyghur Congress* (WUC) in overcoming the issue of discrimination against ethnic Uyghur Muslims in Xinjiang. Through conferences, dialogues and workshops, the WUC has played a significant role in spreading global awareness and training skilled human rights defenders. But on the other hand, the status of WUC as a non-governmental organization and their advocacy network is still not strong enough to urge China to stop any actions that discriminate against ethnic Uyghur Muslims.

Keywords : *Uyghur, Discrimination, Xinjiang, Tiongkok, Regulation on De-extremization, National Sovereignty*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tiongkok merupakan salah satu negara yang tegas dalam menjamin kestabilan dan kedaulatan negaranya dari ancaman terorisme. Sejak fenomena 9/11 lalu, Tiongkok turut serta mengumandangkan dukungannya dalam kebijakan *war on terror* Amerika Serikat (Dillon, 2004, Hal. 157). Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan membasmi segala ideologi dan kegiatan yang dianggap ekstremis dan mengarah ke aksi terorisme (Christofferson, 2006). Pemerintah pusat telah mendefinisikan ancaman terbesar negara mereka yaitu, separatisme, ekstremisme, dan terorisme yang juga dikenal sebagai “*The Three Evil Forces*”(Dupont, 2007). Hal inilah yang sedang terjadi di salah satu wilayah otonomi Tiongkok, Xinjiang atau *Xinjiang Uyghur Autonomous Region* (XUAR). Wilayah ini juga dikenal sebagai *East-Turkestan* atau Turkestan Timur. Sebelum Republik Rakyat Tiongkok dibentuk, masyarakat muslim Uyghur selalu menekankan perbedaan budaya dan sejarah mereka dari etnis Han. Mereka merasa lebih memiliki kesamaan dengan Asia Tengah dibandingkan Tiongkok.

Posisi regional merupakan salah satu alasan kuat karena wilayah *Xinjiang* atau *East Turkestan* tersebut berada di luar *Great Wall of China*, dan kawasan yang dianggap sebagai teritori Tiongkok ialah yang berada di dalam dinding tersebut (United Nations Human Rights Council, 2018).Kerusuhan yang kerap terjadi di Xinjiang yang berada di bagian utara Tiongkok ini, dianggap sebagai ancaman bagi

kedaulatan negara karena terdapat beberapa kelompok separatis dan ekstremis Islam yang kian melakukan unjuk rasa dan kerusuhan.

Namun unjuk rasa maupun demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Uyghur yang mayoritas beragama Islam ini, disebabkan oleh ketidaksenangan mereka atas diskriminasi yang dilakukan pemerintah pusat. Masyarakat muslim Uyghur merupakan salah satu etnis minoritas di Tiongkok dan mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan peraturan yang membatasi aktivitas sehari-hari mereka. Masyarakat muslim Uyghur memiliki kebudayaan, bahasa dan agama yang berbeda dibandingkan kaum Han yang merupakan mayoritas masyarakat Tiongkok (Spence, 1990)

Awalnya pemerintahan Tiongkok melakukan pendekatan yang relatif bersahabat terhadap masyarakat muslim Uyghur. Setelah revolusi budaya yang berdampak negatif pada tahun 1970-an, pemerintah mengupayakan integrasi nasional terhadap kelompok minoritas dan kelompok mayoritas yang dominan. Pemerintah mengizinkan dibangunnya masjid, aktivitas keagamaan dan kebudayaan, membangun sekolah keagamaan dll. Namun upaya tersebut menyebabkan munculnya sentimen nasional yang menyebabkan lahirnya solidaritas masyarakat muslim Uyghur yang ingin memisahkan diri dari Tiongkok. Oleh karena itu pemerintah beralih menggunakan taktik asimilasi, yaitu melakukan migrasi etnis Han ke Xinjiang (Fuller & Lipman, 2004), membatasi kebebasan aktivitas beragama, melakukan beberapa kebijakan sosiopolitik yang mendiskriminasi masyarakat muslim Uyghur, dan kebijakan lainnya yang menyudutkan posisi mereka di wilayahnya sendiri(Eimer, 2009)

Sejak ditetapkan kebijakan de-ekstremisasi atau *Regulation on de-extremism* oleh Tiongkok pada tahun 2014, banyak masyarakat muslim Uyghur mencoba kabur dan mencari suaka keluar negeri. Australia dan Turki merupakan salah satu negara yang paling banyak didatangi oleh mereka. Beberapa aktivitas masyarakat muslim yang dibatasi di Xinjiang ialah seperti dilarang menggunakan hijab, menumbuhkan jenggot, menangkap beberapa ulama yang dianggap menyebarkan paham ekstremis dan menutup masjid di Karakash (Hernández, 2017). Beberapa guru maupun pelajar di Xinjiang bahkan dilarang untuk berpuasa pada bulan Ramadhan (Human Rights Watch, 2015a).

Isu pelanggaran hak asasi manusia ini telah banyak dikritik oleh dunia dan organisasi internasional seperti *Human Right Watch* (HRW) dan *Office of The United Nation High Commisioner for Human Rights* (OHCHR). *Human Right Watch* sangat aktif dalam mengekspos dan memberitakan informasi terbaru mengenai keadaan masyarakat muslim Uyghur di Xinjiang, begitu juga OHCHR melalui *The Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) yang ingin memasukkan laporan mengenai diskriminasi Tiongkok ke dalam *International Convention on the Elimination of Racial Discrimination* (World Uyghur Congress, 2018)

Institusi seperti *World Uyghur Congress* (WUC) yang berdiri sejak 2004 dan bermarkas di Munich, Jerman, juga turut aktif berjuang untuk menyebarkan kesadaran dunia akan kritisnya isu pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang serta melindungi dan menuntut hak muslim Uyghur di dalam ataupun di luar Xinjiang. Seperti NGO lainnya yang berfokus di bidang hak asasi lainnya, WUC bertujuan untuk membela hak asasi kaum Uyghur yang ditindas oleh negaranya sendiri.

Terlihat dari aktivitas mereka yang aktif menyebarkan isu HAM di sosial media dan mengeluarkan laporan terkait pelanggaran HAM di Xinjiang. WUC pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai kelompok advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan global. WUC kerap mengadakan konferensi, demonstrasi maupun dialog dengan bekerja sama dengan NGO lainnya. Pada awal berdirinya WUC lebih berfokus dalam menyelenggarakan *Youth Training Camp* yang berfokus tentang cara mengembangkan kesadaran global akan permasalahan yang terjadi di Uyghur. Namun setelah bekerja sama dengan organisasi lain dan mendapat dukungan dari organisasi seperti *National Endowment for Democracy* (NED), WUC berhasil mengadakan beberapa seminar pelatihan kepada para masyarakat Uyghur yang mengalami diaspora dan tinggal di beberapa wilayah seperti Jerman, Amerika Serikat, Belgia, Jepang dsb.

Seminar yang juga berlangsung di Jenewa, Swiss pada 2014 lalu tersebut semakin berfokus dalam melatih dan mengembangkan wawasan partisipan mengenai kinerja mekanisme PBB, sistem hak asasi manusia yang diadopsi PBB, badan-badan PBB, prosedur serta hak asasi kaum minoritas. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan agen pembela hak asasi manusia yang terampil (World Uyghur Congress, 2014) *Workshop* yang diselenggarakan di Istanbul pada 2018 lalu juga berfokus dalam mempelajari strategi dalam advokasi internasional serta bagaimana berhubungan dengan politisi maupun institusi lainnya demi menciptakan sebuah jaringan advokasi (World Uyghur Congress, 2018)

WUC juga sering mengeluarkan laporan dan telah mengirimkan 2018 *Parallel Submission to CERD* dan *Submission 3rd Universal Periodic Review (UPR) of the People's Republic of China (PRC)* yang dikirim kepada United

Nations Human Right Council (UNHRC). Upaya tersebut diharapkan dapat membantu PBB dalam mendesak Tiongkok pada pertemuan tinjauan berskala universal yang dilaksanakan pada November lalu.

Perwakilan Tiongkok menanggapi tuduhan internasional tersebut dengan menekankan bahwa isu ini merupakan permasalahan domestik, dan seharusnya mereka memastikan kredibilitas dari sumber informasi yang mereka terima. Hal ini disampaikan pada September lalu oleh juru bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuan kepada Michelle Bachelet yang menjabat sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Bachelet menegaskan kepada Tiongkok untuk membebaskan mereka yang ditahan di kamp detensi massal yang mereka miliki karena adanya dugaan bahwa Tiongkok menggunakan kekerasan dalam menginterogasi pihak yang tidak terbukti bersalah. Geng Shuan lalu menangkis tuduhan tersebut dan menekankan PBB untuk menghormati kedaulatan Tiongkok dan tidak ikut campur dalam permasalahan domestik mereka (World Uyghur Congress, 2018)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai upaya *World Uyghur Congress* (WUC) dalam menuntut hak asasi muslim Uyghur di Xinjiang dan yang telah bermigrasi keluar dari Xinjiang. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah : Bagaimana Upaya *World Uyghur Congress* (WUC) dalam Mengangkat Isu Diskriminasi Pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya yang telah dijalankan oleh WUC dalam mengangkat isu diskriminasi Muslim Uyghur kepada masyarakat dunia serta perjuangan mereka untuk menemukan penyelesaian masalah dan menghentikan kekerasan yang terjadi. Berbagai upaya seperti laporan dan pernyataan yang telah mereka rancang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan konsep *Transnational Advocacy Network*.

1.4. Signifikansi Penelitian

Permasalahan diskriminasi kepada kelompok minoritas bukanlah sesuatu yang baru, berabad-abad sejarah dunia dipenuhi oleh adanya dominasi dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Hal yang sama terjadi di Tiongkok saat ini di mana pemerintah mengekang beberapa etnis yang dianggap berbahaya atau menjadi ancaman bagi kestabilan dan kedaulatan negara. Isu yang lebih sering diangkat dan diketahui dunia ialah mengenai permasalahan diskriminasi di Tibet dan Dalai Lama, permasalahan yang ditimpa oleh kaum muslim Uyghur hanya diekspos dan diberitakan oleh beberapa sumber saja.

Pada kenyataannya keadaan masyarakat muslim Uyghur sekarang sudah semakin diperparah oleh banyaknya aturan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang. Hal tersebut pula yang menyebabkan banyak dari masyarakat muslim Uyghur memilih untuk mencari suaka dan keluar dari Xinjiang. *World Uyghur Congress* (WUC) merupakan organisasi yang berfokus dalam menegakkan keadilan terhadap kaum muslim Uyghur baik di Xinjiang maupun di luar Xinjiang. Organisasi yang berdiri sejak 2004 ini dibentuk oleh para pemimpin Uyghur yang dulunya tergabung dalam organisasi yang bernama *East Turkestan National Centre*

(ETNC). WUC memiliki banyak afiliasi dan bekerja dengan beberapa organisasi internasional lainnya seperti UNHRC maupun organisasi di benua Eropa. WUC juga telah giat membuat berbagai laporan maupun pernyataan mengenai kejadian terbaru yang sedang berlangsung di Xinjiang (Hidayat, 2013).

Oleh karena itu, penelitian pada skripsi ini menjadi kajian penting untuk menganalisis kegiatan WUC melalui laporan dan upayanya untuk mengangkat isu diskriminasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap muslim Uyghur ke mata dunia serta menemukan penyelesaian konflik melalui jalan damai. Melalui wawancara yang dilakukan kepada muslim Uyghur yang berada di luar Xinjiang, organisasi ini berupaya untuk menyampaikan suara mereka kepada masyarakat global. Beberapa laporan yang mereka keluarkan seperti *Parallel Submission to the CERD for the People's Republic of China* (PRC) membantu mengangkat isu ini untuk dibawa ke meja diskusi dan menuntut Tiongkok untuk menghentikan segala tindakan yang melanggar hak asasi manusia di Xinjiang.

1.5. Cakupan Penelitian

Fokus skripsi ini adalah selama durasi kampanye yang dijalankan oleh Xi Jinping yaitu *Strike Hard Campaign* yang berjalan selama 5 tahun dari 2014-2018. Alasan penulis memfokuskan studi kasus mengenai kampanye ini ialah karena Xi Jinping telah menjalankan beberapa kebijakan yang semakin membatasi aktivitas sehari-hari masyarakat muslim Uyghur, serta terdapat beberapa pertemuan penting dan WUC telah mengeluarkan beberapa laporan penting.

Dalam jangka waktu berjalannya kampanye ini, Tiongkok telah membuat beberapa kebijakan baru serta memperketat beberapa peraturan yang mereka miliki. Salah satunya ialah dengan mengirimkan 200.000 staf pemerintahan ke beberapa

wilayah pedesaan di Xinjiang untuk menjamin tidak adanya ketidakstabilan sosial serta menanam pemikiran yang searah dengan kepentingan Tiongkok (Human Rights Watch, 2018c).

Melalui sumber yang mereka miliki serta kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, WUC semakin gencar menyebarkan informasi terkait penyiksaan dan ketidakadilan yang berlangsung di Xinjiang. Salah satunya ialah laporan yang dikeluarkan oleh WUC kepada *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) pada Agustus 2018 lalu yaitu *Parallel Submission to the CERD for the People's Republic of China (PRC)*. Mengikuti laporan yang telah dikirimkan tersebut, UNHRC melalui *United Nations Universal Periodical Review* kembali menuntut Tiongkok untuk menghentikan segala tindakan yang melanggar hak asasi rakyatnya (Cumming-Bruce, 2018)

1.6. Tinjauan Pustaka

Krisis pelanggaran hak asasi manusia sudah terjadi di Tiongkok sejak abad lalu. Dalam bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan mencoba mengambil berbagai literatur dan karya ilmiah yang membahas mengenai isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi kepada kaum muslim Uyghur, kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Tiongkok di Xinjiang, serta upaya apa saja yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini.

1.6.1. Akar permasalahan antara Uyghur dan Pemerintah Tiongkok

Melalui tulisan Jacky Wiggins dalam jurnalnya yang berjudul “*Survival of Uyghur Ethnic Identity: A Case of Self Preservation*“, ia menjelaskan bahwa akar permasalahan antara kaum muslim Uyghur dan pemerintah ini telah dimulai sejak Republik Rakyat China (RRC) dibentuk pada tahun 1949. Wiggins juga

menambahkan bahwa kebijakan yang awalnya diciptakan untuk menjunjung hak kaum minoritas pada kenyataannya menjadikan mereka semakin tertekan. Contohnya seperti kebijakan migrasi kaum Han ke wilayah Xinjiang, yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian di sana berakhir dengan adanya dominasi kaum Han yang lebih terpelajar di Xinjiang. Kaum muslim Uyghur menjadi kehilangan kesempatan kerja serta mendapat bayaran yang lebih rendah (Wiggins, 2008, hal 39-44) .

Dalam tulisan Raymond Lee yang berjudul “*Muslim in China and their Relationship with the States* “, ia memaparkan sensus data populasi masyarakat muslim di Tiongkok serta bagaimana hubungan dinamis antara kelompok minoritas dengan pemerintahan Tiongkok. Lee menekankan pentingnya pemahaman mengenai etnis minoritas muslim di Tiongkok serta kebijakannya. Lee menjelaskan dari 55 etnis di Tiongkok, masyarakat Uyghur dan Tibet merupakan etnis yang paling sering ditekan pemerintah dengan adanya kebijakan yang mengekang praktik keagamaan dan budaya mereka. Melalui kebijakan asimilasi serta tekanan yang terus bertambah inilah yang menyebabkan semakin berkurangnya jumlah populasi muslim Uyghur di Xinjiang. Setiap tahun semakin banyak dari mereka yang berencana untuk mencari suaka ke negeri tetangga seperti Kazakhstan dll (Lee, 2015).

Andrew Mumford juga menjelaskan melalui tulisannya *Theory-Testing Uyghur Terrorism in China* bahwa banyaknya jumlah kelompok pemberontak dan separatis di Tiongkok, menjadi alasan pemerintah semakin membatasi kehidupan masyarakat di sana. Atas dasar melindungi kepentingan negara dan mempertahankan kestabilan, pemerintah Tiongkok menangkap siapa saja yang

diduga sebagai anggota ataupun berhubungan dengan kelompok ekstremis. Banyak dari mereka yang ditahan dan dipenjarakan oleh pemerintah Tiongkok ialah mereka yang tidak terbukti bersalah (Mumford, 2018).

1.6.2. Kebijakan de-ekstremisasi pemerintahan Tiongkok

Dalam tulisan Anshumali Shukla yang berjudul *“The Uyghur (A Troubled Minorities in China)”*, ia menjelaskan ketegangan apa saja yang telah terjadi antara pemerintah dan muslim Uyghur seperti kebijakan yang membatasi praktik keagamaan, asimilasi paksa oleh pemerintahan, eksploitasi ekonomi, kebijakan anti teror dsb. Shukla juga menjelaskan apa konsekuensi dari ketegangan yang terus terjadi tersebut, contohnya seperti semakin tumbuhnya gerakan ekstremis dari masyarakat yang merasa ditekan oleh pemerintah serta semakin memperbesar kesenjangan antara etnis Han dan Uyghur (Shukla, 2016,hal.293-295).

Selain itu, Patrick Meyer juga menjelaskan melalui tulisannya yang berjudul *“China’s De-Extremization of Uyghurs in Xinjiang”* mengenai kebijakan de-ekstremisasi yang dilakukan sejak selesainya Revolusi Industri di Tiongkok. Awalnya pemerintahan pusat mencoba melakukan pendekatan yang berintegrasi, namun hal ini menyebabkan munculnya sentimen nasionalisme di tengah masyarakat Uyghur. Sentimen ini mendorong masyarakat muslim Uyghur untuk mencoba memisahkan diri dari pemerintah pusat, salah satu upayanya yaitu dengan melakukan pemberontakan pada tahun 1990 (Patrik Meyer, 2012). Setelah itu pemerintah beralih dengan pendekatan asimilasi di mana kebijakannya menekan aktivitas beragama dan budaya serta mengurangi kebebasan bersuara masyarakat muslim Uyghur (Patrick Meyer, 2016).

Pemerintah pusat juga melakukan beberapa kampanye seperti “Kampanye Penumpasan selama 100 Hari “ pada bulan Januari 1999, “ Kampanye Umum Melawan Terorisme” pada bulan April 1999, dan “ Kampanye Keras” pada bulan 2001. Kampanye tersebut bertujuan untuk mengurangi serta mengisolasi masyarakat Uyghur dari warisan, kebudayaan dan kepercayaan mereka (Castets, 2003). Meyer juga menjelaskan bagaimana Partai Komunis China sebagai partai yang berkuasa di Tiongkok mengendalikan media pada akhir tahun 1999-an sampai awal tahun 2000-an dengan menuduh kelompok ekstremis, separatisme etnis serta kelompok terorisme internasional sebagai dalang dibalik kerusuhan yang terjadi di wilayah Xinjiang. Permasalahan domestik yang awalnya merupakan isu politik dan sosial ini dimanfaatkan pemerintah pusat sebagai agenda mereka dalam melawan isu terorisme internasional atau kebijakan “*War on Terror*”. Salah satu kampanye baru yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok ialah kampanye “ Berkunjung, Mengembangkan standar kehidupan, dan Meraih Hati Orang “ yang dimulai pada tahun 2014 (Human Rights Watch, 2018c).

Meyer menyimpulkan bahwa kampanye de-ekstremisasi yang dijalankan Pemerintah Tiongkok pada dasarnya bukanlah upaya untuk menindas segala bentuk maupun potensi ancaman bagi keamanan negara. Tujuan dibalik kampanye ini ialah untuk menghilangkan cara hidup masyarakat Uyghur dan menggantikannya dengan cara hidup yang tunduk kepada pemerintahan CPC dan menanam pemikiran dalam benak mereka untuk lebih mementingkan Tiongkok dibandingkan apapun(Patrick Meyer, 2016, hal.16)

Lebih lanjut dijelaskan juga oleh Marie Trédaniel dan Pak K. Lee dalam “*Explaining the Chinese framing of the “terrorist” violence in Xinjiang: insights*

from securitization theory bahwa definisi terorisme yang dimiliki oleh Tiongkok terlalu luas. Pemerintah sepakat menganggap kesadaran etnis yang dimiliki oleh muslim Uyghur sebagai ancaman bagi keamanan negara. Hal tersebutlah yang menyebabkan semakin tertekannya mereka yang tinggal di Xinjiang sekarang. Pemerintah memberikan batasan yang terlalu mengekang dan definisi terorisme mereka yang samar tersebut menyebabkan banyak kelompok ataupun pihak yang damai ditangkap oleh pemerintah Tiongkok karena melakukan sesuatu yang “mencurigakan” (Trédaniel & Lee, 2018)

1.6.3. Posisi *World Uyghur Congress* terhadap etnis Uyghur

Berbagai organisasi internasional maupun perwakilan negara telah menyampaikan opini serta saran mereka dalam menyelesaikan isu diskriminasi di Xinjiang. Muhammad Nizar Hidayat dalam tulisannya yang berjudul “Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina” menjelaskan bagaimana *World Uyghur Congress* (WUC) yang dibangun pada 2004 lalu dibentuk oleh organisasi yang bernama *East Turkestan National Centre* (ETNC) (Shichor, 2007, hal.121). Hidayat juga menjelaskan upaya WUC dalam menuntut ditegakkan hak masyarakat muslim Uyghur melalui advokasi dan propaganda. Upaya ini dilakukan dengan mencari dukungan serta melobi para pembuat kebijakan (Corell, 2008, hal.8). Hidayat menyimpulkan tiga sasaran lobi WUC yaitu 1) Pemerintah Negara di Dunia, 2) Organisasi Internasional dan 3) Media Internasional. Hidayat juga menambahkan upaya *counter propaganda* yang dilakukan oleh WUC, di mana organisasi ini dengan sigap menyanggah dan mengkritik setiap propaganda yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Dalam berbagai laporannya, WUC selalu menyertakan isu apa saja yang

masih berlangsung di Tiongkok dan merekomendasikan langkah terbaik dalam menyelesaikan isu tersebut (Hidayat, 2013).

Işık Kuşçu menjelaskan dalam tulisannya "*The Uyghur Diaspora in Cyberspace: Identity and Homeland Cause*" bahwa diaspora etnis Uyghur yang terjadi sejak akhir abad lalu menyebabkan lahirnya banyak organisasi perwakilan masyarakat muslim Uyghur di berbagai negara. Kuşçu menambahkan *World Uyghur Congress* merupakan dianggap sebagai organisasi yang sah mewakilkan etnis Uyghur yang berada di dalam maupun di luar Tiongkok. Kuşçu menganggap WUC terlahir atas keinginan para pemimpin Uyghur untuk menyatukan kembali kaumnya yang tersebar di berbagai negara dan menciptakan institusi yang dapat mewakili kepentingan mereka (Kuşçu, 2014, hal.148).

Berbeda dengan tulisan-tulisan di atas yang lebih membahas mengenai awal mula isu diskriminasi di Xinjiang, kesenjangan antara kaum muslim Uyghur dan Han, kebijakan de-ektemisasi yang diimplementasikan oleh Tiongkok, serta beberapa upaya advokasi yang dilakukan oleh *World Uyghur Congress*, penelitian ini akan melengkapi penelitian dan tulisan sebelumnya dengan menganalisis upaya *World Uyghur Congress* (WUC) secara mendalam sebagai suatu organisasi eksternal yang dapat berpengaruh secara signifikan dalam mengangkat isu ini ke mata dunia dan menuntut pemerintahan Tiongkok untuk menghentikan diskriminasi dan kekerasan yang ada. Dalam menganalisis upaya *World Uyghur Congress* tulisan ini akan memperlihatkan semakin signifikannya upaya Organisasi Internasional dalam menyelesaikan permasalahan global di abad ini. Hal ini penting karena selama ini Tiongkok yang telah lama terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia selalu menolak adanya ikut campur pihak luar terhadap masalah

domestiknya, terutama institusi non pemerintah seperti *World Uyghur Congress* yang dianggap tidak memiliki wewenang dan kekuatan untuk menekan Tiongkok.

Melalui pendekatan *Transnational Advocacy Network* , penulis akan memberikan pemaparan analisis yang komprehensif mengenai upaya *World Uyghur Congress* dalam membantu masyarakat Muslim Uyghur di Xinjiang serta usaha mereka dalam menekan diskriminasi pemerintah Tiongkok yang berkedok kebijakan de-ekstremisasi tersebut.

1.7. Landasan Konsep

Transnational Advocacy Network

Konsep ini pertama kali digunakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink pada 1999 untuk membahas upaya suatu kelompok tertentu dalam menyelesaikan isu domestik maupun internasional. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa *Transnational Advocacy Network* ialah kelompok yang bekerja secara regional maupun global, memiliki nilai, norma dan berbagi informasi mengenai fokus isu mereka (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.89).

1.7.1. Aktor dari *Transnational Advocacy Network*

Aktor dalam jaringan ini saling berhubungan untuk menyatukan kerja sama dengan organisasi yang lebih berpengaruh. Kelompok yang biasanya tergabung ke dalam suatu jaringan advokasi ini yaitu 1) NGO domestik atau internasional, organisasi peneliti ataupun organisasi penasihat, 2) media, gereja, *trade unions*, intelektual organisasi konsumen, 3) bagian dari *Intergovernmental Organizations* (IGO) ataupun 4) bagian dari eksekutif/ parlemen suatu pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, *World Uyghur Congress* sebagai NGO internasional dapat dikategorikan sebagai salah satu aktor dalam suatu jaringan transnasional atau *Transnational Advocacy Network*. WUC aktif berbagi informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan advokasi dan *agenda setting* bersama dengan aktor lainnya. Hubungan timbal balik yang erat antara WUC dan afiliasinya memperlihatkan bagaimana organisasi tersebut merupakan bagian dari suatu jaringan advokasi transnasional. Melalui hubungan kerja sama dengan aktor dalam jaringan tersebut WUC aktif menjalankan upayanya dalam mengangkat isu diskriminasi terhadap muslim Uyghur ini.

Jaringan advokasi ini terdiri dari berbagai organisasi di dunia yang ikut mengangkat isu pelanggaran hak asasi muslim Uyghur ke kancah internasional seperti *Uyghur American Association (UAA)*, *Uyghur Human Right Project (UHRP)*, *Human Rights Watch (HRW)* ataupun IGO seperti badan-badan PBB seperti *United Nations Human Right Council (UNHRC)*, *Committee Against Torture (CAT)*, *Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)* dsb. Skripsi ini akan menganalisis hubungan kerja sama antara WUC dengan para aktor dalam jaringan advokasi tersebut dalam mengangkat isu ini.

1.7.2. Faktor Pendorong Terbentuknya *Transnational Advocacy Network*

Hubungan antara aktor internasional merupakan dasar dari terbentuknya sistem jaringan transnasional dalam dunia politik global. Keck & Sikkink menekankan bahwa keberadaan jaringan ini telah lama tersebar, namun mereka memaparkan lebih lanjut bagaimana jaringan advokasi ini terbentuk seperti :

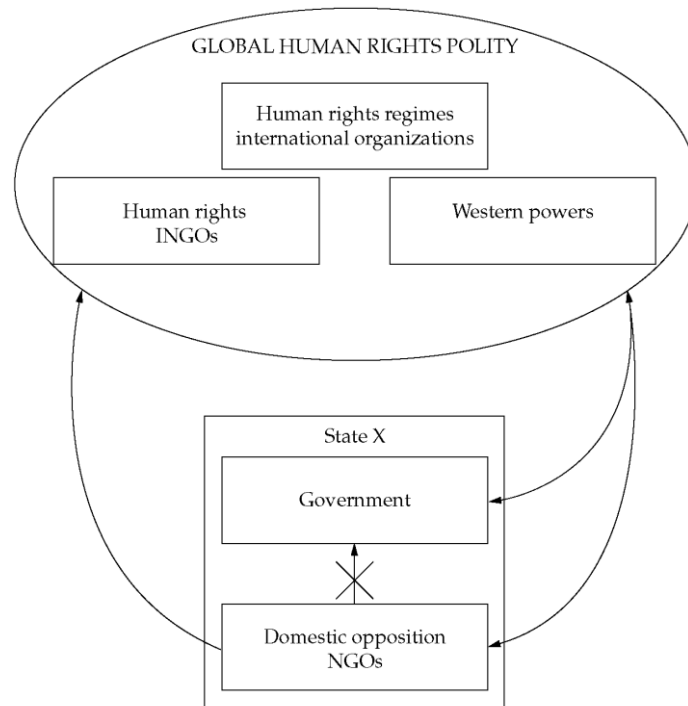
1. Tidak adanya hubungan ataupun komunikasi memadai antar organisasi domestik dan pemerintah pusat. Dari sini muncullah pola kegiatan yang disebut sebagai “Efek Bumerang” yang digunakan organisasi domestik untuk mencari dukungan dari organisasi yang lebih berpengaruh untuk menekan pemerintah.
2. Kepercayaan yang dimiliki oleh para aktivis / *political entrepreneurs* bahwa apabila jaringan advokasi ada maka aktivitas maupun kampanye yang mereka miliki dapat lebih dijalankan secara maksimal.
3. Konferensi ataupun forum internasional merupakan alat yang tepat untuk membangun dan memperkuat jaringan. (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.93)

Karakteristik di atas akan membantu dalam memberikan penjelasan dan membuktikan bagaimana sistem jaringan advokasi terkait isu diskriminasi muslim Uyghur ini terbentuk dan menjabarkan upaya WUC sebagai salah satu aktor di dalamnya berusaha mengangkat isu ini.

1.7.3. Efek Bumerang

Keck dan Sikkink juga menjelaskan mengenai efek bumerang yaitu, ketika suatu NGO regional tidak bisa mempengaruhi kebijakan negaranya sehingga mereka meminta pertolongan dari NGO ataupun IGO internasional untuk memberikan tekanan kepada negara tersebut (Risse, Ropp, & Sikkink, 1999, hal.18)

Grafik 1.1. Efek Bumerang



Sumber : (Risse et al., 1999, hal.19)

Dari bagan di atas dapat dilihat pola dari efek bumerang yang dijalankan dalam jaringan transnasional. Pola ini memperlihatkan aktivitas dari berbagai aktor dalam jaringan transnasional yang akhirnya menciptakan suatu tekanan terhadap negara dari atas (*from above*) dan dari bawah (*from below*) (Risse et al., 1999, hal.18). Tekanan dari atas yaitu dari organisasi hak asasi internasional, rezim internasional serta *western powers*. Sedangkan tekanan dari bawah ialah kelompok domestik. Upaya WUC dalam menekan Tiongkok dan menuntut negara lain untuk ikut mendesak Tiongkok dapat dianalisis melalui efek bumerang tersebut.

1.7.4. Kinerja *Transnational Advocacy Network*

Dalam menganalisis bagaimana konsep *Transnational advocacy Network* ini bekerja, Keck dan Sikkink mengklasifikasikannya ke dalam empat taktik yang

sering kali digunakan yaitu : politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh dan politik akuntabilitas.

- 1) **Politik informasi (*Information Politics*)**, yaitu kemampuan untuk menggunakan informasi secara politik dan dapat dipercaya agar menghasilkan dampak yang signifikan.
- 2) **Politik Simbolik (*Symbolic Politics*)**, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu simbolis tertentu melalui fenomena yang paling signifikan terjadi. Hal ini bertujuan untuk menarik simpati publik terutama mereka yang jauh dari tempat kejadian.
- 3) **Politik Pengaruh (*Leverage Politics*)**, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan aktor berpengaruh apabila aktor yang kecil tidak bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat.
- 4) **Politik Akuntabilitas (*Accountability Politics*)**, yaitu usaha untuk meyakinkan aktor berpengaruh untuk menjalankan kebijakan yang diinginkan. (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.95)

Upaya yang telah dijalankan oleh WUC selama ini telah menunjukkan contoh dari beberapa taktik diatas. Namun taktik yang paling signifikan diterapkan ialah Politik Informasi, Politik Pengaruh dan Politik Akuntabilitas. Dalam mengaplikasikan Politik Informasi, WUC memanfaatkan kekuatan mereka sebagai NGO untuk menyebarkan informasi yang mereka dapat dan membentuk suatu pandangan politik demi menarik perhatian masyarakat global akan kritisnya isu ini. Informasi ini didapat dari testimoni mereka yang secara langsung terekspos kebijakan Tiongkok yang menekan, baik mereka yang berhasil kabur ke luar negeri atau memiliki keluarga yang ditahan oleh pemerintah Tiongkok. WUC sebagai

perwakilan sah dari masyarakat Uyghur tentunya dapat dengan mudah menemukan sumber dan testimoni tepercaya yang bisa memberikan informasi yang bernilai. Keck & Sickink menjelaskan upaya ini sebagai tindakan persuasif yang biasanya dilakukan oleh *advocacy network*.

Selanjutnya, bentuk Politik Pengaruh yang diterapkan oleh WUC ialah memperluas kerja sama dan hubungan dengan aktor negara maupun non-negara lainnya demi memperbesar pengaruh yang mereka miliki sehingga dapat lebih efektif secara politik dalam menjalankan misinya. Upaya ini berkaitan kuat dengan taktik Politik Informasi, karena melalui penyebaran informasi itulah suatu *advocacy network* dapat mengembangkan jaringannya dan mendapat dukungan dari aktor lain. WUC tentunya memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan jurnalis domestik di Xinjiang, namun tidak cukup besar untuk memberi tekanan terhadap Tiongkok.

Terakhir, Politik Akuntabilitas yaitu upaya yang dilakukan *World Uyghur Congress* dengan mendata informasi yang dimiliki dan membandingkan kondisi yang terjadi di Xinjiang sekarang dan janji yang telah dinyatakan Tiongkok sebelumnya. Melalui taktik ini, WUC memperlihatkan bahwa pemerintah Tiongkok lalai dalam memegang janjinya dalam menjamin hak asasi masyarakat muslim Uyghur pada forum internasional. Hal ini dilakukan dengan mengirimkan laporan kepada organisasi seperti *Committee Against Torture*, *Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)* dll. Tujuan dari upaya ini ialah agar organisasi besar ini dapat memberikan mandat kepada Tiongkok untuk mengeluarkan laporan mereka tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negaranya.

1.7.5. Parameter keberhasilan *Transnational Advocacy Network*

Setelah menganalisis langkah apa saja yang diupayakan oleh suatu jaringan transnasional ini, maka akan terlihat hasil pencapaian dari kegiatan jaringan tersebut. Keck & Sikkink menjelaskan tahapan keberhasilan yang dapat dicapai oleh suatu jaringan sebagai berikut :

- 1) Menciptakan isu dan menetapkan sebuah agenda
- 2) Mempengaruhi posisi aktor baik negara ataupun organisasi internasional dalam suatu isu
- 3) Mempengaruhi prosedur atau sistem secara institusional
- 4) Mempengaruhi perubahan kebijakan terhadap aktor yang menjadi target
- 5) Mempengaruhi perilaku suatu negara

Melalui kegiatan aktifnya dalam mengadakan kegiatan serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan oleh aktor internasional lainnya, WUC telah mencapai tahapan pertama dan kedua dari parameter di atas. Melalui strateginya dalam membangun sebuah isu melalui taktik politik informasi, WUC mengangkat bagaimana dampak dari *Strike Hard Campaign* telah merenggut hak asasi masyarakat muslim Uyghur. WUC membahas bagaimana kebijakan yang dijalankan Tiongkok tersebut bukan lagi sebagai kebijakan anti-terorisme, namun telah menjadi tindakan yang menekan kebebasan berkehidupan serta merenggut identitas nasional muslim Uyghur.

Selanjutnya, tahapan kedua berhasil dicapai oleh WUC dengan menjalankan politik pengaruh dan politik akuntabilitas. Melalui *mobilisation of shame* yang dihasilkan dari demonstrasi dan upaya menekan organisasi internasional yang merupakan agen penegak hak asasi seperti Uni Eropa, CERD, CAT, dan juga UNHRC, WUC telah berhasil mendesak organisasi tersebut untuk lebih tegas

menekan pemerintah Tiongkok untuk menyelesaikan isu ini. Hal ini juga didukung dengan laporan yang dikirimkan oleh WUC kepada organisasi tersebut yang telah dirangkum menjadi analisis data dan informasi yang dimiliki oleh WUC terkait tindakan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Tiongkok.

1.8. Metode Penelitian

1.8.3. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Melalui metode tersebut penulis akan menggunakan studi kasus dan menganalisisnya sesuai dengan teori yang digunakan demi menjawab pertanyaan penelitian. Menurut (Moloeng, 2002, hal.3), metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai :

“ Suatu proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian“

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif ini ialah agar tercapainya suatu pemahaman akan bagaimana upaya *World Uyghur Congress* (WUC) dalam menghadapi diskriminasi pemerintahan Tiongkok terhadap masyarakat muslim Xinjiang.

1.8.4. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis subjek penelitian yang berupa organisasi internasional yaitu *World Uyghur Congress* , sedangkan objek penelitian yang akan diteliti ialah isu diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat muslim Uyghur di Xinjiang.

1.8.5. Metode Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan akan diperoleh melalui orang lain atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2006, hal.225). Oleh karena itu, data atau tulisan yang dihasilkan dari data sekunder ini merupakan suatu laporan dari penelitian suatu pihak lain yang dapat diperoleh dengan menjalankan studi kepustakaan dan dokumen. Informasi dan data yang telah dikumpulkan melalui jurnal, laporan maupun dokumen resmi suatu organisasi maupun pemerintah akan menjadi sumber utama dalam menganalisis studi kasus ini. Begitu juga dengan buku, surat kabar dan web pemerintahan resmi yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa laporan resmi organisasi dan pemerintah, buku-buku, surat kabar, jurnal, laporan, media massa maupun internet seperti web pemerintahan resmi, berita-berita yang memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

Melalui studi kepustakaan dan dokumen penulis ingin menemukan beberapa hal untuk menjawab pertanyaan penelitian, di antaranya adalah :

1. Melihat gambaran secara komprehensif mengenai isu diskriminasi pemerintahan Tiongkok di Xinjiang terhadap masyarakat muslim Uyghur serta seberapa banyaknya upaya *World Uyghur Congress* dalam membantu masyarakat Uyghur tersebut.

2. Melihat alasan dari tindakan pemerintahan Tiongkok menjalankan kebijakan yang menekan hak masyarakat muslim Uyghur serta bagaimana permasalahan diskriminasi yang dijalankan oleh pemerintahan Tiongkok tersebut tidak pernah berhasil diselesaikan.
3. Melihat bagaimana upaya organisasi internasional seperti *World Uyghur Congress* dalam menarik perhatian masyarakat global dan menekan pemerintahan Tiongkok untuk menyelesaikan isu diskriminasi domestik di Xinjiang.

1.8.6. Proses Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mulai menganalisis data yang ada. Analisis data ialah proses dalam mengatur urutan data, mengorganisasikan data yang diperoleh, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan hal yang penting, dan kemudian memutuskan apa yang dapat diinformasikan kepada pembaca (Moloeng, 2002, hal.103). Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha memberikan pemaparan yang jelas dan rinci demi memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai isu diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang.

Kemudian, penelitian ini akan melihat bagaimana upaya dan pengaruh *World Uyghur Congress* (WUC) dalam membantu masyarakat muslim Uyghur yang menjadi korban diskriminasi tersebut. Setelah semua data yang dibutuhkan telah disampaikan, maka penulis akan menganalisis upaya *World Uyghur Congress* (WUC) tersebut secara lebih mendalam melalui landasan konseptual yang akan digunakan yaitu *Transnational Advocacy Network*

BAB II

UPAYA *WORLD UYGHUR CONGRESS* (WUC)

DALAM MENGAANGKAT ISU DISKRIMINASI UYGHUR

Hubungan dinamis antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, organisasi non pemerintah dll dapat dipandang sebagai suatu jaringan. Setiap aktor ini memiliki upaya dan tujuan masing-masing dalam menghadapi suatu isu, namun kerja sama dalam jaringan tersebut mempermudah mereka dalam mencapai tujuannya. (Mcdermott, 1998). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya skripsi ini akan menggunakan teori *Transnational Advocacy Network*. Teori ini dikembangkan oleh Keck & Sikkink untuk mempermudah analisis upaya NGO yang kian membesar. Keck & Sikkink melihat perkembangan politik dunia sejak akhir abad 20 yang tidak lagi didominasi oleh kekuatan negara namun juga dipengaruhi oleh keberadaan organisasi internasional.

Keck & Sikkink menjelaskan, lahirnya jaringan organisasi ini sering ditemukan dalam organisasi yang berfokus dalam isu hak asasi manusia. Aktor-aktor tersebut lalu berbagi informasi dan bekerja sama dalam membentuk strategi yang dapat mengangkat isu yang mereka tangani (Khagram, Riker, & Sikkink, 2002, hal.7). Upaya merangkai suatu isu dilakukan oleh para aktor untuk memastikan target yang ditentukan dapat terpengaruh dan tertarik akan isu tersebut. Melalui isu yang dibentuk ini jaringan tersebut juga mempromosikan ide, nilai, maupun norma yang mereka miliki agar dapat dengan mudah diterima oleh target tersebut (Risse-Kappen, 1995). Jaringan transnasional ini juga dapat ditemukan pada organisasi yang berfokus dan telah mengangkat isu diskriminasi Uyghur di

Xinjiang. Organisasi serta aktivis yang kian berjuang dalam menuntut hak asasinya ialah organisasi yang dibentuk oleh muslim Uyghur sendiri seperti WUC, *Uyghur Human Right Project* (UHRP), NGO yang berfokus terhadap hak asasi manusia seperti *National Endowment for Democracy* (NED), *Unrepresented Nations & People Organization* (UNPO) *Human Rights Watch*, dan IGO seperti Uni Eropa dan badan traktat PBB (UNHRC, CERD, CAT, CEDAW) dll.

Beberapa tahun ini organisasi di atas fokus dalam isu diskriminasi yang berasal dari salah satu kebijakan dari presiden Xi Jinping terbaru di Tiongkok pada tahun 2014 yaitu *Strike Hard Campaign*. Kampanye ini bertujuan untuk menangkap siapa saja yang menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, serta menghilangkan bibit-bibit ketegangan yang menyebabkan ketidakstabilan sosial. (Human Rights Watch, 2018, hal.13). Implementasi kebijakan tersebut menimbulkan keresahan dan kepanikan di antara organisasi transnasional lainnya. Kekhawatiran mereka akan semakin meluasnya pelanggaran hak asasi muslim Uyghur mendorong aktor-aktor ini memperkuat aktivitas dan kerja samanya dengan aktor lain di dalam jaringan advokasi transnasional.

Upaya tersebut sesuai dengan penjelasan Keck & Sikkink bahwa jaringan transnasional ini dapat dipandang sebagai suatu *political spaces*, atau ruang politik di mana para aktor dapat berdebat dan mendiskusikan bagaimana langkah sosial, politik dan budaya yang tepat dalam mencapai tujuan mereka. Aktor yang berhubungan ini tentunya tidak sepenuhnya memiliki kepentingan, nilai maupun norma yang sama, oleh karena itu diskusi diperlukan untuk mencapai tujuan kolektif (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.90). *World Uyghur Congress* sebagai salah satu aktor di dalam jaringan ini turut andil dalam mengadakan kegiatan seperti

konferensi, seminar, *workshop* maupun demonstrasi yang bertujuan untuk mengolah informasi yang didapat bersama aktivis dan organisasi lainnya serta merancang strategi terkait bagaimana langkah yang tepat untuk mengangkat isu ini agar bisa menarik perhatian organisasi transnasional dan masyarakat global. WUC juga aktif berpartisipasi dalam forum minoritas di PBB serta mengeluarkan laporan yang nantinya akan dikirim kepada badan traktat PBB sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mempertanyakan isu diskriminasi ini kepada Tiongkok dalam beberapa tinjauan ke depan.

2.1. Upaya Menekan Pemerintah Tiongkok

Keck & Sikkink menjelaskan salah satu alasan lahirnya jaringan advokasi transnasional ialah karena terputusnya hubungan baik antara kelompok domestik dan pemerintah. Hal ini mempersulit komunikasi yang berguna dalam mencari penyelesaian secara damai antara kedua pihak (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.93). Kejadian yang sama terjadi kepada para aktivis dan organisasi domestik yang berada di dalam Xinjiang, mereka ditangkap dengan tuduhan menyebarkan paham ekstremis dan membahayakan kedaulatan negara

2.1.1. Kondisi aktivis dan organisasi domestik di Xinjiang

Pemerintah Tiongkok telah menjalankan berbagai kebijakan de-ekstremisasi untuk mencegah lahirnya gerakan terorisme. Kuatnya pandangan umum akan hubungan terorisme dan Islam menyebabkan pemerintah Tiongkok untuk menetapkan bahwa semua aktivitas maupun tindakan yang berbau agama sebagai sesuatu yang abnormal. Hal ini pula yang menimbulkan sikap skeptis pemerintah Tiongkok terhadap para aktivis dan organisasi domestik di dalam Xinjiang. Sasaran dari kebijakan de-ekstremisme tersebut bukan lagi mereka yang terbukti melakukan

kekerasan, namun juga para jurnalis, aktivis, serta organisasi yang dinilai pemerintah Tiongkok dapat memicu gerakan separatisme.

Hal ini terjadi kepada cendekiawan dan ahli ekonomi, Ilham Tohti yang aktif dalam mengungkap permasalahan yang terjadi di Xinjiang dan sering kali memberikan saran mengenai bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi permasalahan ini. Ia di tahan sejak 2014 lalu karena dianggap mendukung separatisme dan terorisme. Namun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh *Human Rights Watch* (HRW), melalui situs *UyghurOnline* yang didirikannya Ilham Tohti memang kritis dalam menyinggung permasalahan ini, namun ia tidak pernah mengusulkan kekerasan atau menekankan bahwa ia ingin Xinjiang independen dan terlepas dari pemerintah Tiongkok. Tohti berupaya penting dalam mengajak masyarakat Uyghur untuk melakukan debat secara damai serta sering kali memberi solusi terkait permasalahan diskriminasi ekonomi pada masyarakat muslim Uyghur (Richardson, 2016).

Aktivis hak asasi manusia, Huseyincan Celil juga ditahan ketika sedang berada di Uzbekistan dan dideportasi secara paksa ke Tiongkok. Ia mendapat hukuman penjara 20 tahun karena mendukung gerakan islami dan gerakan politik di Uyghur. Kejadian ini merupakan salah satu contoh kasus *forced return* yang jelas melanggar hak asasi muslim Uyghur. (Irwin, 2016, hal.7)

Aktivis lainnya ialah Rebiya Kadeer, ia merupakan pembisnis dan aktivis sukses dari Xinjiang dan sempat mendapat perlakuan baik dari pemerintah Tiongkok. Ia pernah menjadi wanita terkaya di Tiongkok pada tahun 1993 dan menjadi perwakilan Tiongkok pada konferensi PBB terkait perempuan di Beijing pada tahun 1995. Namun, setelah ia mengangkat topik isu permasalahan hak asasi

muslim Uyghur di depan Kongres Nasional, pemerintahan Tiongkok pun beralih menuduhnya sebagai tokoh yang membahayakan keamanan negara. Kadeer sempat di tahan dalam penjara selama 8 tahun karena rencananya yang ingin bertemu dengan anggota kongres dari Amerika Serikat. Setelah keluar pada tahun 2005 ia mencari perlindungan ke Amerika Serikat (Nasaw, 2009).

Pendiri dari organisasi damai seperti *Movement for Uyghur Mother-Tongue Based Education*, Abduweli Ayup juga sempat di tahan dari tahun 2013-2014. Organisasi ini bertujuan untuk merestorasi budaya dan bahasa masyarakat muslim Uyghur yang mulai punah di wilayahnya sendiri (World Uyghur Congress, 2014, hal.15). Hal ini didorong karena minimnya mata pelajaran yang mengajarkan bahasa Uyghur di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah pusat di Xinjiang. Pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan edukasi bilingual di sekolah-sekolah tersebut dengan tujuan melakukan asimilasi bahasa Tiongkok secara menyeluruh kepada anak-anak Uyghur. Walaupun organisasi ini telah berusaha bekerja sama dengan pemerintah pusat agar dapat didirikan secara legal mengikuti peraturan yang ada, namun Abduweli Ayup dan rekan-rekannya masih ditahan dengan tuduhan menerima donasi ilegal. Apabila Abduweli Ayup tidak mengaku bersalah atas tuduhan itu, ia diancam akan dituduh atas tindakan melawan kebijakan edukasi bilingual yang akan mendapat hukuman yang lebih berat (Shir, 2019, hal.27)

Melalui contoh di atas, dapat terlihat sulitnya kelompok domestik untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada lagi kelompok dan aktivis domestik yang dapat membela hak asasi muslim Uyghur secara terbuka, karena pemerintah Tiongkok telah melakukan

pemantauan yang ketat terhadap siapa saja yang terlihat tidak setuju dengan kebijakan negara (Human Rights Watch, 2018, hal.17). Mereka juga tidak bisa mencari pertolongan ke NGO ataupun IGO internasional karena adanya larangan berkomunikasi dengan pihak luar. Hal ini sudah diperkirakan pula oleh para pendiri *World Uyghur Congress*, mereka khawatir akan ikut campur dan penolakan dari pemerintah Tiongkok apabila organisasi ini didirikan di dalam wilayah Xinjiang (Hidayat, 2013, hal.167).

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan faktor diaspora Uyghur yang telah mencari perlindungan di luar negeri, serta keterbatasan ruang gerak dalam bersuara di Xinjiang, akhirnya organisasi ini didirikan di Munich, Jerman. Organisasi ini didirikan oleh kelompok muslim Uyghur yang berdomisili di luar Xinjiang pada 16 April 2004 dan merupakan hasil dari peleburan kelompok yang telah ada, *East Turkestan National Congress* dan *World Uyghur Youth Congress* (Hidayat, 2013, hal.167).

Dampak dari blokade yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok inilah yang akhirnya mendorong terciptanya sebuah jaringan transnasional yang terkhusus membela hak asasi masyarakat Uyghur. Para aktivis serta cendekiawan yang terpisah ke berbagai wilayah berinisiatif untuk membentuk organisasi maupun asosiasi guna menyatukan masyarakat Uyghur yang mengalami diaspora. Tiap organisasi ini lalu saling bekerja sama dalam menyalurkan informasi dan mengadakan aktivitasnya dengan tujuan mendapat pengaruh dan dukungan yang cukup untuk menekan pemerintahan Tiongkok.

Salah satu upaya menekan Tiongkok di Amerika Serikat dilakukan oleh aktivis Rebiya Kadeer. Setelah keluar dari penjara ia mencari perlindungan di

Amerika Serikat, dan berperan penting dalam mengadakan kampanye dan aktivitas lain yang membahas isu diskriminasi Uyghur di sana. Pertemuannya dengan Dalai Lama pada tahun 2005 juga memperlihatkan upayanya menguak kebenaran akan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap kaum minoritas. Salah satu kesuksesannya dalam menekan Tiongkok ialah keberhasilannya mendapat pengakuan dari presiden Amerika, George W. Bush pada tahun 2007 berkat upaya kerasnya sebagai aktivis hak asasi manusia dalam menyebarkan wawasan masyarakat Amerika Serikat terkait isu ini (UAA, 2007).

Atas kesuksesannya di sana, pemerintah Tiongkok kerap memantau setiap kegiatan yang dilakukan Kadeer di Amerika. Beberapa keberhasilan Kadeer dalam mengangkat isu ini terlihat dari pencapaiannya mendapat *Rafto Prize for Human Rights* dari Norwegia pada tahun 2004, nominasi *Nobel Prize for Peace* dan menjabat sebagai presiden WUC dari tahun 2006-2017 (RFA, 2008).

Organisasi yang didirikan oleh masyarakat Uyghur di Amerika Serikat seperti *Uyghur Human Rights Project* (UHRP) dan *Uyghur American Association* (UAA) juga aktif melakukan konferensi dan demonstrasi yang mengajak masyarakat Amerika Serikat untuk ikut memperjuangkan kebebasan muslim Uyghur. Melalui upaya ini akhirnya Amerika Serikat mengeluarkan *Uyghur Human Right Policy Act* pada tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk mengolah sumber daya yang dimiliki Amerika Serikat dalam membantu dan menghadapi dampak *Strike Hard Campaign* terhadap pelanggaran hak asasi muslim Uyghur, salah satu contohnya ialah penahanan satu juta muslim Uyghur di kamp reedukasi (US Congress, 2018).

World Uyghur Congress juga memperlihatkan bagaimana jaringan transnasional bekerja sama dalam menekan pemerintah Tiongkok. *World Uyghur*

Congress atau WUC ialah organisasi transnasional yang bekerja sama dengan organisasi Uyghur regional di berbagai negara dan NGO hak asasi manusia lainnya. Melalui kerja sama antar organisasi Uyghur ini maka diadakanlah berbagai konferensi dan *workshop* yang bertujuan memperkuat pengaruh dan wawasan mereka mengenai mekanisme PBB demi mempermudah aktivitas lobi. Lalu WUC yang mewakili beberapa organisasi Uyghur tersebut ikut serta dalam forum internasional yang diadakan oleh IGO seperti Uni Eropa dan PBB (Hidayat, 2013, hal.167).

Berkat keaktifan WUC dan organisasi Uyghur lainnya ini, perhatian masyarakat global akan gentingnya isu pelanggaran hak asasi muslim Uyghur ini semakin meningkat. Upaya ini bukan hanya bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai isu diskriminasi muslim Uyghur namun juga bertujuan untuk menarik dukungan dari aktivis, negara maupun organisasi lainnya. Organisasi ini bersifat demokratis dan bertujuan untuk mempromosikan dan menuntut hak muslim Uyghur secara damai. Berbeda dengan prasangka pemerintah Tiongkok bahwa mereka menuntut pemisahan diri dari pemerintah pusat, *World Uyghur Congress* menekankan jika mereka hanya menuntut ditegakkannya demokrasi, dihormati hak asasinya dan kewenangan bagi mereka untuk mengurus kehidupannya sendiri (Reed & Raschke, 2010).

2.1.2. Implementasi Efek Bumerang

Dalam skema efek bumerang yang dijelaskan oleh Keck & Sikkink terdapat keterikatan antara tiga aktor penting yaitu, kelompok domestik, pemerintahan hak asasi manusia global (INGO, *Western Power*, Rezim Internasional), dan negara. Arus aktivitas antara ketiga aktor inilah yang nantinya akan menciptakan suatu

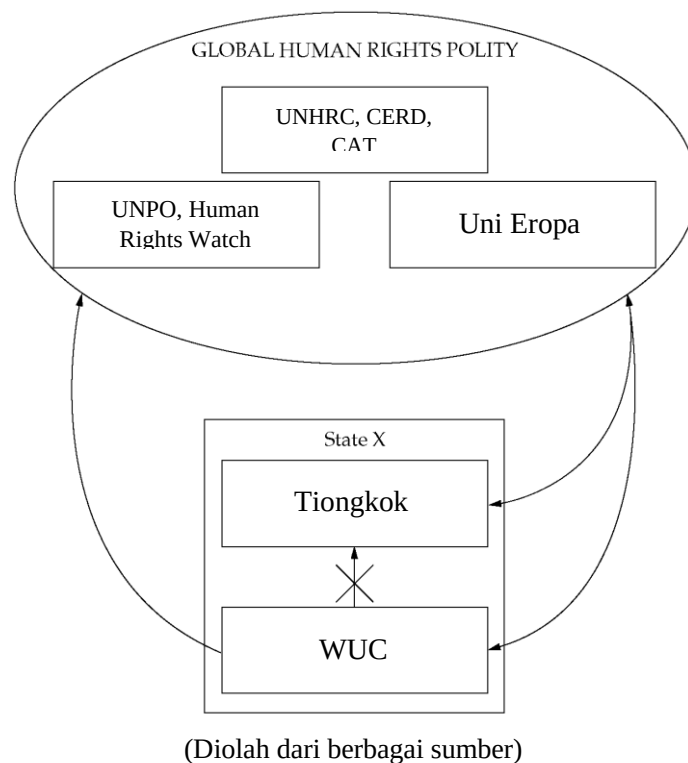
tekanan terhadap negara dari atas (*from above*) dan dari bawah (*from below*) (Risse et al., 1999, hal.18). Tekanan dari atas yaitu dari organisasi hak asasi internasional, rezim internasional serta *western powers*. Sedangkan tekanan dari bawah ialah kelompok domestik itu sendiri serta para masyarakat Uyghur yang menjadi sumber informasi dan testimoni.

Keck & Sikkink menjelaskan bahwa efek bumerang ini lahir dari ketidakmampuan suatu kelompok domestik dalam menekan negaranya, sehingga kelompok tersebut mencari dukungan dari aktor internasional. Aktor internasional ini ialah organisasi yang memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menekan negara tersebut (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.93). Melalui penjelasan subbab sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa eksistensi kelompok domestik di Xinjiang sudah tidak memungkinkan, bahkan para aktivis domestik sudah ditangkap atau keluar dari Xinjiang.

Kondisi di Xinjiang yang sangat ketat serta minimnya perwakilan organisasi domestik yang memperjuangkan haknya di dalam negeri memungkinkan WUC yang merepresentasikan kaum Uyghur baik di dalam maupun di luar Xinjiang sebagai perpanjangan tangan kelompok domestik tersebut. Hal ini didukung beberapa fakta yaitu, WUC didirikan oleh para masyarakat dan aktivis Uyghur yang kabur dari Xinjiang, mayoritas dari anggota WUC ialah mereka yang diaspora dari Xinjiang, WUC merepresentasikan mayoritas organisasi Uyghur yang tersebar di seluruh dunia, serta kekhawatiran pendiri WUC akan ikut campur dan penolakan dari pemerintah Tiongkok apabila organisasi ini didirikan di dalam wilayah Xinjiang.

Permasalahan yang dialami oleh WUC pun tidak jauh berbeda dengan kelompok domestik, mereka tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah Tiongkok. Sehingga mereka memilih untuk bekerja sama dengan aktor NGO dan IGO lain di dalam jaringan advokasi agar aktor yang lebih berpengaruh tersebut dapat membantu dalam menekan Tiongkok. Berikut bagan hubungan antara WUC, Tiongkok dan IGO :

Grafik 2.1. Efek Bumerang antara WUC, Rezim Internasional & Tiongkok



Tidak terjalinnya hubungan komunikasi antara WUC dan Tiongkok menyebabkan WUC beralih mencari dukungan dari aktor-aktor internasional berpengaruh lainnya. Melalui bagan di atas dapat terlihat empat aktor penting yang menjadi fokus WUC dalam mengupayakan efek bumerang ini yaitu, *Human Rights*

Watch, UNPO, Uni Eropa, dan Badan Hak Asasi Manusia di PBB (UNHRC, CAT dan CERD)

Pertama, hubungan kerja sama antara WUC dengan UNPO dan *Human Rights Watch* awalnya dilakukan melalui upaya berbagi informasi. Keck & Sikkink pun menjelaskan bahwa aktivitas di dalam jaringan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka mendapatkan informasi dan merancang strategi berdasarkan informasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Ketiga organisasi ini juga kerap berpartisipasi dalam forum internasional yang diadakan Uni Eropa dan PBB. Salah satunya ialah pertemuan panitia kecil di Parlemen Eropa pada 2018 lalu yang membahas perlunya peningkatan kerja sama antara aktor penegak hak asasi manusia muslim Uyghur (UNPO, 2018).

WUC telah bekerja sama dengan UNPO dalam mengadakan konferensi dan berpartisipasi dalam demonstrasi pada tahun 2018 lalu di Swiss. WUC juga sering mengutip informasi dan testimoni masyarakat muslim Uyghur yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch*. Kedua organisasi ini pun terlibat dalam mengirim surat kepada PBB terkait hasil dari Tinjauan Berskala Universal yang tidak memasukkan saran dari beberapa organisasi yang telah mengirimkan laporannya. HRW juga aktif mengirimkan laporan dan surat kepada PBB dan Uni Eropa. Salah satunya ialah surat yang dikirim pada tahun 2018 terkait kewajiban negara di Uni Eropa melindungi para *asylum seekers* dan *refugees* dari Xinjiang (Human Rights Watch, 2018). Kerja sama antara tiga organisasi ini cenderung berfokus dalam mencari solusi dan menentukan strategi yang tepat. Sebagai sesama NGO transnasional, WUC dan organisasi ini sering berupaya mendesak organisasi seperti Uni Eropa

dan PBB yang lebih berpengaruh untuk lebih tegas mengangkat isu ini dalam pertemuan, dialog ataupun tinjauan yang sering diadakan bersama Tiongkok.

Selanjutnya, mengingat WUC sendiri didirikan di Jerman, organisasi ini kerap menjalankan kerja sama dengan Uni Eropa. Kerja sama ini sering kali dijalankan dengan Anggota dari Parlemen Eropa atau *Members of European Parliaments* (MEPs). Sidang umum ke-6 yang diadakan WUC pun ikut dihadiri oleh anggota dari parlemen tersebut. (World Uyghur Congress, 2017). Salah satu hasil dari kerja sama antara WUC, dan parlemen ini ialah dibentuknya *Uyghur Friendship Group* pada 2017 lalu, kelompok ini beranggotakan para anggota Parlemen Eropa yang ingin bergabung memperjuangkan hak asasi muslim Uyghur. *Uyghur Friendship Group* tersebut berhasil mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan *European People's Party* (EPP) di Parlemen Eropa dan fokus membahas permasalahan penahanan massal muslim Uyghur di dalam kamp reedukasi. Melalui kegiatan ini WUC diwakili oleh Dolkun Isa yang menjabat sebagai presiden mendorong Uni Eropa untuk mengangkat isu tersebut dalam Dialog Hak Asasi UE-China yang akan datang (World Uyghur Congress, 2018).

WUC juga mengimbau Uni Eropa untuk menekan Tiongkok dalam Dialog Hak Asasi Manusia UE-Tiongkok yang dilaksanakan pada Juli 2018 (Irwin, 2017, hal. 28). Melalui dorongan tersebut, perwakilan tinggi dari Uni Eropa Federica Mogherini menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap pembentukan kamp reedukasi secara sewenang-wenang oleh Tiongkok. Perwakilan Uni Eropa mendesak Tiongkok untuk meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah lama ditandatanganinya. Uni Eropa juga mengangkat isu penahanan tokoh-tokoh penting Uyghur seperti Ilham Tohti serta mendorong Tiongkok untuk

menghentikan praktik kamp reedukasi yang melanggar hak asasi masyarakatnya. Selain itu, Uni Eropa juga membahas salah satu kekhawatiran WUC yaitu perihal interogasi melalui penyiksaan serta akses tahanan terhadap pengacara. Uni Eropa menyarankan kepada Tiongkok untuk memperbolehkan investigasi dari pihak luar terkait tuduhan penyiksaan yang dilakukan kepada tahanan. Secara umum Uni Eropa telah menyampaikan beberapa keinginan WUC yaitu mendesak Tiongkok untuk menghormati hak kaum minoritas, hak beragama, hak berserikat dll (European External Action Service, 2018).

Terakhir, Pendekatan yang dilakukan WUC kepada badan hak asasi manusia PBB seperti UNHRC, CERD dan CAT ialah dengan mengirimkan submisi laporan sebagai bahan informasi yang telah dianalisis agar dapat membantu organisasi tersebut dalam pertemuan tinjauan yang akan diselenggarakan dengan Tiongkok. Berikut laporan yang telah dikirimkan antara tahun 2014-2018 :

Tabel 2.1. Laporan World Uyghur Congress

No.	Judul	Tahun	Isu
1	<i>Alternative Report. Submission to the United Nations Committee Against Torture (CAT)</i>	2015	Isu penyiksaan dalam kamp detensi, Ekstradisi, <i>Forced Returns</i> dll.
2	<i>World Uyghur Congress Submission 3rd Universal Periodic Review (UPR) Of People's Republic of China</i>	2018	Kebebasan Berekspresi, <i>State Surveillance</i> ,Kamp Re-edukasi dll.
3	<i>Parallel Submission to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) for the People's Republic of China (PRC)</i>	2018	Kamp doktrinisasi politik, <i>Counter-Terrorism Law</i> dll.

(Diolah dari berbagai sumber)

Laporan No.1 merupakan hasil kerja sama dengan UHRP yang ditujukan kepada *Committee Against Torture* sebagai bantuan dalam memberikan informasi

dan isu yang mendesak terkait diskriminasi yang diterima masyarakat muslim Uyghur. Menjelang sesi pertemuan CAT-Tiongkok yang akan dilakukan pada Desember 2015 lalu, WUC menyarankan komite tersebut untuk mempertanyakan Tiongkok mengenai kasus penyiksaan yang dialami masyarakat muslim Uyghur di dalam kamp detensi serta kasus *forced returns* terhadap *refugee* yang tidak sesuai dengan prinsip *non-refoulement* dalam hukum kebiasaan internasional (The World Uyghur Congress (WUC) & The Uyghur Human Rights Project (UHRP), 2015).

WUC juga mendesak komite ini untuk mempertanyakan Tiongkok mengenai peraturan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam konvensi *Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang telah diratifikasi Tiongkok pada tahun 1988 . Salah satunya ialah definisi penyiksaan yang dimiliki oleh pemerintah yang dianggap masih tidak mencakup beberapa jenis penyiksaan. Definisi yang terlalu luas ini mempermudah Tiongkok dalam melakukan interogasi dengan mengandalkan bentuk penyiksaan lain, contohnya seperti penyiksaan psikologis (Human Rights Watch, 2018, hal.2).

Dalam pertemuannya dengan Tiongkok, komite ini telah menyampaikan beberapa kekhawatiran WUC terkait isu ini. Seperti rekomendasi yang pernah diberikan pada tinjauan sebelumnya, CERD menekan Tiongkok untuk mengadopsi definisi dari penyiksaan sesuai dengan konvensi yang telah diratifikasi dan memastikan mereka yang ditahan memiliki akses terhadap pengacara sebagai agen formal untuk membela dirinya. CERD juga mendesak Tiongkok untuk mengeluarkan data-data negara mengenai dugaan penyiksaan tahanan (Committee against Torture, 2016, hal 2-3).

Laporan No.2 ditujukan kepada *United Nations Human Right Council* mengikuti *Universal Periodical Review* (UPR) ke-3 Tiongkok yang akan diselenggarakan pada November 2018. Tinjauan Berskala Universal atau *Universal Periodic Review* merupakan sesi setiap lima tahun sekali yang diadakan oleh PBB di bawah pengawasan *Human Right Council* untuk meninjau bagaimana isu hak asasi manusia yang terjadi di setiap negara di dunia.

Laporan yang dikirimkan oleh WUC pada 2018 lalu ini merangkum rekomendasi sebelumnya yang telah diterima Tiongkok pada tinjauan sesi ke-2 yang telah dilakukan oleh PBB pada tahun 2013 (United Nations Human Rights Council, 2020). Dalam laporan tersebut WUC ingin *Human Right Council* menuntut Tiongkok untuk memberikan hak otonomi kepada Xinjiang sepenuhnya, menghapus keberadaan kamp reedukasi, membebaskan masuknya investigasi secara transparan, menyelaraskan kebijakan anti-terorisme negara dengan standar hukum internasional, dll (World Uyghur Congress, 2018).

Melalui tinjauan ini UNHRC menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditelaah dikirimkan oleh NGO, *working groups*, badan traktat PBB serta negara. UNHRC menekan Tiongkok untuk membebaskan masyarakat muslim Uyghur dalam melakukan praktik keagamaan. UNHRC juga mendesak Tiongkok untuk menutup semua kamp reedukasi yang dijalankan dan mengizinkan investigasi dari PBB ke dalam wilayah Xinjiang terkait dugaan-dugaan yang diterima. UNHRC berulang kali menyampaikan permasalahan masuknya tim investigasi ke dalam Xinjiang karena banyak negara seperti Prancis, Australia, Finlandia dll yang menuntut Tiongkok untuk memberikan transparansi secara penuh terkait isu ini (UNHRC, 2018).

Laporan No.3 ditujukan kepada *Committee Against Racial Discrimination* (CERD) sebagai informasi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan komite pada sesi review yang diadakan pada Agustus 2018. Tiongkok telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* pada tahun 1981 (Chen, 2019, hal.1185) dan telah melakukan tinjauan dengan CERD selama dua kali yaitu pada tahun 2009 dan 2018 (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2020).

WUC menyediakan pertanyaan yang dapat diberikan terkait kejadian yang terjadi sejak tinjauan sebelumnya pada tahun 2009 sampai dengan 2018. WUC menginginkan konfirmasi pemerintah Tiongkok akan beberapa hal seperti : Apa alasan diberlakukannya larangan berbahasa Uyghur di wilayah Hotan? Berikan penjelasan terkait ditahannya 1 juta masyarakat Uyghur di kamp doktrinisasi politis di Xinjiang. Berapa banyak masjid yang telah dihancurkan pada tahun 2016? Aktivitas beragama apa yang diperbolehkan di Xinjiang? (World Uyghur Congress, 2018)

Melalui tinjauan yang dilakukan pada Agustus 2018 lalu, perwakilan CERD telah berusaha mendesak Tiongkok untuk menghentikan penahanan masyarakat Uyghur yang belum terbukti melakukan kejahatan ke dalam kamp massal yang mereka miliki. CERD juga merekomendasikan Tiongkok untuk memberikan data yang lengkap terkait kondisi masyarakat yang ditahan, menghentikan pemantauan ketat terhadap muslim Uyghur, serta memberikan informasi terkait keberadaan para pelajar maupun *Refugees* yang dipaksa kembali ke Xinjiang (CERD, 2018, hal.8).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bagaimana upaya WUC dalam memastikan organisasi-organisasi berpengaruh dapat mendukung mereka

dan menekan pemerintah Tiongkok. Kerja sama dan laporan yang disediakan oleh WUC memungkinkan terjalinnya hubungan baik dengan aktor-aktor tersebut. Sesuai dengan keinginan WUC, aktor seperti Uni Eropa dan badan traktat PBB telah berupaya lebih tegas mendesak pemerintah Tiongkok. Upaya ini menyebabkan terbentuknya tekanan dari atas (*from above*) dan dari bawah (*from below*). Melalui tekanan dan dukungan internasional yang kian meluas ini diharapkan Tiongkok dapat didesak untuk memperbaiki isu pelanggaran hak asasi yang sudah terlalu lama terjadi ini.

2.2. Jaringan Transnasional sebagai Instrumen Promotor Isu

Diaspora masyarakat Uyghur menjadi tantangan mereka dalam menuntut hak asasinya, oleh karena itu para aktivis dan politikus Uyghur yang berada di luar negeri berkeinginan untuk menyatukan kembali masyarakatnya yang tersebar di berbagai negara dan menciptakan institusi yang dapat mewakili kepentingan mereka (Kuşçu, 2014, hal.148). Demi mempermudah mereka dalam mencapai tujuannya maka tiap organisasi tersebut bekerja sama dan berkolaborasi dalam menjalankan aktivitasnya. Beberapa aktivis Uyghur menyatakan alasan pentingnya menjalin hubungan kerja sama dalam jaringan transnasional.

Anggota dari Parlemen Eropa, László Tőkés menyampaikan dukungan penuhnya dalam setiap aktivitas yang bertujuan untuk menyatukan dan memperkuat solidaritas antar organisasi dan aktivis yang berjuang untuk membela masyarakat muslim Uyghur (UNPO, 2018). Dalam pertemuan panitia kecil hak asasi di Parlemen Eropa, Dolkun Isa menyampaikan mengenai suksesnya kegiatan tersebut memperluas kesadaran global akan isu pelanggaran hak asasi di Xinjiang, namun

ia menekankan agar mencapai hasil yang signifikan diperlukan lagi upaya bersama antar aktor dalam jaringan secara cepat. (UNPO, 2018)

Upaya memperluas kerja sama inilah yang lalu melahirkan sebuah jaringan advokasi transnasional. Jaringan advokasi pada kenyataannya berperan penting dalam menyatukan norma budaya dan sosial yang ada untuk menyelesaikan suatu permasalahan isu internasional. Upaya yang dilakukan kelompok ini terlihat melalui bagaimana mereka mendorong suatu agenda tertentu yang akan menarik perhatian masyarakat dunia dengan menyediakan informasi yang mendalam terkait isu tersebut.

Melalui diaspora masyarakat muslim Uyghur di seluruh di dunia, maka akan terbentuklah berbagai jenis fondasi, asosiasi maupun organisasi Uyghur di tiap negara tersebut. Hubungan kerja sama yang tersebar luas ini pun akan memperkuat pengaruh mereka dalam melobi dan mengajak aktor-aktor lainnya untuk turut serta mendukung hak masyarakat muslim Uyghur. Faktor inilah yang menyebabkan tiap organisasi Uyghur yang terpecah di berbagai negara menyatukan kerja samanya Mayoritas organisasi tersebut berafiliasi dengan WUC yang aktif mengikuti forum ataupun diskusi yang oleh organisasi transnasional lainnya. Sejak berdiri *World Uyghur Congress* telah mengulurkan kerja sama mereka dengan hampir 30 organisasi Uyghur lainnya (Kuşçu, 2014, hal.149). Hingga sekarang WUC sudah menjadi suatu organisasi payung atau *umbrella organization* yang menaungi organisasi lainnya yang tersebar di 18 negara. Melalui situsnya organisasi yang berafiliasi dengan *World Uyghur Congress* ialah :

Tabel 2.2. Organisasi yang berafiliasi dengan *World Uyghur Congress*

Amerika	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uyghur American Association (UAA)</i> • <i>Uyghur Human Right Project, Campaign for Uyghurs</i> • <i>International Uyghur Human Right and Democracy Foundation</i>
Australia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>East Turkestan Australian Association</i> • <i>Australian Uyghur Association</i> • <i>Viktoria Uyghur Association</i>
Austria	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Austria Uyghur Association</i>
Belanda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Eastern Turkistan Uyghur Association in Netherlands</i>
Belgia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Belgium Uyghur Association</i>
Britania Raya	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uighur U.K. Association</i>
Finlandia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>East Turkistan Association in Finland</i>
Jepang	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Japan Uyghur Association</i>
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> • <i>East Turkistan Union in Europe, Uyghur Women's Committee in Germany,</i> • <i>Uyghur Mother's Union in Germany</i> • <i>Ilham Tohti Initiative</i>
Kanada	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Canada East Turkestan Union</i>
Kazakshtan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uyghur Youth Union in Kazakhstan</i> • <i>Society Union of Uyghur National Association</i> • <i>Kazakhstan National Culture Center</i>
Kirgistan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>"Ittipak" Uigur Society of the Kyrgyz Republic</i> • <i>Bishkek Human Rights Committee</i>
Norwegia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Norway Uyghur Committee</i>
Prancis	<ul style="list-style-type: none"> • <i>France Uyghur Community</i>
Swedia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sweden Uyghur Education Union</i>
Swiss	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Switzerland East Turkestan Association</i>
Turki	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Eastern Turkistan Foundation, Isa Yusup Alptekin Foundation</i> • <i>East Turkistan Youth and Cultural Association</i> • <i>Uyghur Research Institute, Euro-Asia Foundation</i> • <i>Teklimakan Publishing House</i>
Uzbekistan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uzbekistan Uyghur Culture Center</i>

Sumber : (World Uyghur Congress, 2020)

Mayoritas dari organisasi di atas, lebih berfokus dalam memfasilitasi serta membantu para masyarakat muslim Uyghur yang berada di negaranya. Beberapa

aktivitas juga diupayakan melibatkan pemerintahan di tiap negara tersebut. Contohnya seperti *East Turkestan Australian Association* (ETAA) yang berbasis di Australia, organisasi ini kerap mengadakan demonstrasi, salah satunya ialah demonstrasi pada tahun 2014 dan 2018 terkait protes akan ketidakadilan yang dialami muslim Uyghur dan keberadaan kamp reedukasi di Xinjiang yang diduga telah menahan sejuta muslim Uyghur. Tujuan dari demonstrasi ini ialah menunjukkan kepada pemerintahan Australia betapa mendesaknya permasalahan ini dan memberikan wawasan kepada masyarakat di sana terkait isu tersebut (East Turkestan Australian Association, 2018). ETAA juga mengirimkan surat terima kasih kepada beberapa politikus yang menyampaikan isu ini ke dalam parlemen Australia. Salah satunya ialah Richard Di Natale, politikus dan pemimpin dari *Green Groups*. Ia menyampaikan kekhawatirannya akan di monitornya masyarakat muslim Uyghur yang berada di Australia oleh Tiongkok. Ia juga menekan Tiongkok untuk mengikuti standar internasional terkait mengenai kebebasan beragama dan beropini(Hunter, 2018)

Berbeda dengan organisasi di atas, *World Uyghur Congress* cenderung melakukan kegiatan yang bersifat transnasional seperti bekerja sama dengan organisasi hak asai manusia lainnya serta berpartisipasi dalam forum Uni Eropa dan PBB. WUC dalam situsnya menyatakan bahwa semua kegiatan yang diadakannya merupakan representasi dari organisasi-organisasi di atas. Oleh karena itu kegiatan advokasi transnasional lebih cenderung diselenggarakan oleh WUC. Apabila terdapat kegiatan konferensi, *workshop* ataupun seminar di suatu negara, WUC akan berkoordinasi dengan organisasi yang berdomisili di negara tersebut demi mempermudah pelaksanaannya(World Uyghur Congress, 2020).

Selain itu, WUC aktif terjun ke dalam forum internasional lain demi memperluas kerja samanya dan menarik dukungan dari aktivis maupun individu lain yang tertarik akan isu ini. Contohnya seperti berpartisipasi dalam forum yang disediakan oleh PBB terkait minoritas. Dolkun Isa sebagai presiden WUC mengisi forum tersebut dengan membahas bagaimana terbatasnya hak masyarakat muslim Uyghur untuk mempelajari bahasa daerahnya, semenjak Tiongkok mengimplementasikan sistem pendidikan bilingual. Selain itu Tiongkok telah melanggar penggunaan bahasa Uyghur di wilayah Hotan sejak bulan September 2017 (World Uyghur Congress, 2018).

Tujuan WUC berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tersebut ialah agar mengembangkan nama mereka di dalam dunia internasional sehingga diakui sebagai aktor penting yang memperjuangkan kemerdekaan dan dihormatinya hak asasi masyarakat muslim Uyghur (Hidayat, 2013, hal.174).

Keberhasilan *World Uyghur Congress* dalam mengembangkan kerja samanya di dalam jaringan transnasional ini juga didukung oleh kecanggihan teknologi pada masa sekarang. Keberadaan internet mempermudah jalur komunikasi serta partisipasi masyarakat muslim Uyghur yang tersebar dan meningkatkan dukungan dari masyarakat internasional (Vergani & Zuev, 2011, hal.208). Internet juga membantu dalam menyatukan identitas masyarakat muslim Uyghur agar tetap solid dan tidak terpecah ke dalam fraksi dan grup sosial yang memiliki visi & misi yang berbeda (Kuşçu, 2014, hal.153).

2.3. Pentingnya Aktivitas Internasional dalam Memperkuat Jaringan

Menurut Keck & Sikkink, kegiatan internasional yang melibatkan banyak aktor merupakan strategi yang tepat dalam memperluas dan memperkuat hubungan kerja sama di dalam jaringan advokasi (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.93). Maka dari itu para aktor transnasional akan melakukan pertemuan ataupun mengadakan kegiatan yang berguna sebagai media untuk membahas informasi yang dimiliki dan merancang strategi. Sejak berdirinya WUC telah ikut terlibat dalam berbagai aktivitas yang merangkul setiap individu maupun organisasi transnasional lainnya yang berkeinginan kuat untuk membela masyarakat muslim Uyghur. Konferensi dan diskusi yang sering diadakan bertujuan untuk memperluas kesadaran masyarakat internasional akan situasi yang kian terjadi serta mempersiapkan diri dan menambah wawasan akan sistem kinerja dunia politik internasional dalam menentukan kebijakan. Implementasi kebijakan *Strike Hard Campaign* menyebabkan banyak kegiatan yang diadakan berfokus dalam membahas dampak dari kebijakan tersebut terhadap hak masyarakat muslim Uyghur di Xinjiang. Beberapa kegiatan tersebut berupa konferensi, seminar, demonstrasi ataupun forum internasional di PBB. Berikut beberapa aktivitas internasional yang telah dilakukan:

2.3.1. Konferensi dan Workshop

Beberapa kegiatan ini diadakan oleh WUC yang bekerja sama dengan NGO dan IGO internasional lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para partisipan serta mempermudah para aktor transnasional yang terlibat dalam menganalisis informasi dan menyusun strategi yang tepat untuk diterapkan. Konferensi dan Seminar yang diadakan tersebut ialah :

Tabel 2.3. Aktivitas *World Uyghur Congress*

Aktivitas	Tahun	Kerja sama	Tempat
Seminar Pelatihan	2017	<ul style="list-style-type: none"> • <i>National Endowment for Democracy</i> • <i>Sweden Uyghur Education Union</i> • <i>Unpresented Nations and Peoples Organization (UNPO)</i> 	Stockholm, Sweden
Konferensi	2018	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Norwegian Uyghur Committee</i> • <i>Rafto Foundation for Human Rights</i> • <i>National Endowment for Democracy</i> 	Oslo, Norwegia
	2018	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uyghur Human Rights Project (UHRP)</i> • <i>Unpresented Nations and Peoples Organisation (UNPO)</i> • <i>Uyghur American Association (UAA)</i> 	Washington DC, Amerika
	2018	<i>European People's Party (EPP)</i>	Brussel, Jerman

(Diolah dari berbagai sumber)

WUC mengadakan satu seminar pelatihan pada bulan Agustus 2017 yang bekerja sama dengan *National Endowment for Democracy (NED)*, *Sweden Uyghur Education Union*, dan *Unpresented Nations and Peoples Organization (UNPO)*. Seminar ini di isi oleh perwakilan *Uyghur Human Rights Project (UHRP)* dan membahas keinginan untuk memperluas dukungan terhadap muslim Uyghur di Amerika (World Uyghur Congress, 2017). Seminar ini juga melakukan pelatihan kepada partisipan dalam mengembangkan wawasannya tentang langkah advokasi perihal hak asasi manusia dan upaya hukum internasional. Melalui pelatihan ini, WUC bersama organisasi lainnya berkeinginan untuk mengembangkan pengetahuan partisipan terkait badan yang menangani hak asasi manusia di PBB

dan Uni Eropa serta betapa pentingnya menjalin hubungan kerja sama dengan institusi internasional tersebut. Kegiatan ini memperkuat hubungan dan menambah jaringan komunitas antara partisipan yang bergabung. (World Uyghur Congress, 2017).

Selain itu, WUC juga berpartisipasi dalam tiga konferensi yang diselenggarakan pada tahun 2018. Konferensi pertama berjudul *Uyghur Linguistic Rights Under Assault: Uyghur Language & Cultural Rights In East Turkestan*. Konferensi ini bekerja sama dengan *Norwegian Uyghur Committee* dan *Rafto Foundation for Human Rights* diselenggarakan di Oslo, Norwegia. Diskusi ini membahas terkait Hak Kebudayaan dan Bahasa masyarakat Uyghur terutama tentang batasan penggunaan bahasa Uyghur yang semakin menjadi di wilayah Hotan. Masyarakat muslim Uyghur dilarang menggunakan bahasa ibu mereka dalam aktivitas publik ataupun kegiatan belajar. Konferensi ini menekankan bagaimana tindakan pemerintah Tiongkok tersebut telah melanggar beberapa peraturan terkait minoritas (World Uyghur Congress, 2018).

Konferensi kedua berjudul *Religious Freedom and Cultural Values Under Siege* dan diadakan di Washington DC. Kegiatan ini bekerja sama dengan organisasi Uyghur setempat yaitu bekerja sama dengan *Uyghur Human Rights Project* (UHRP), *Uyghur American Association* (UAA), dan juga *Unrepresented Nations and Peoples Organisation* (UNPO). Konferensi ini membahas peraturan baru yang ditetapkan Tiongkok pada 2017 semakin membatasi hak asasi masyarakat muslim Uyghur (UNPO, 2018a). Peraturan tersebut terkait pelanggaran menggunakan atribut keislaman seperti menumbuhkan jenggot, menggunakan hijab dan memberikan nama islam kepada anak. Konferensi ini juga membahas

masyarakat muslim Uyghur yang ditahan oleh Tiongkok telah mencapai perkiraan 1 juta jiwa. Mereka yang ditahan tersebut ditangkap karena melakukan aktivitas keagamaan atau memiliki hubungan dengan seseorang yang berada di luar negeri (World Uyghur Congress, 2018).

Konferensi terakhir berjudul *A People Under Threat: Hundreds of Thousands of Uyghurs Arbitrary Detained in China* yang diadakan pada Juni 2018. WUC diwakili oleh *Uyghur Friendship Group* berkolaborasi dengan *European People's Party* (EPP). Konferensi ini membahas tentang kasus hilangnya beberapa individu Uyghur serta keberadaan kamp politis Tiongkok yang melakukan doktrin terhadap para tahanannya. Dalam kegiatan ini, Dolkun Isa sebagai presiden WUC mendorong Uni Eropa untuk mengangkat isu tersebut dalam Dialog Hak Asasi UE-China yang akan datang (World Uyghur Congress, 2018).

2.3.2. Sidang Umum dan Forum Internasional

Selain berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan seperti konferensi dan seminar, WUC juga ikut serta dalam beberapa pertemuan internasional.

Tabel 2.4. Aktivitas World Uyghur Congress

Aktivitas	Tahun	Kerja sama	Tempat
Sidang Umum (<i>General Assembly</i>)	2017	• Dihadiri oleh anggota dari Parlemen Eropa, anggota dari Parlemen Republik Federal Jerman atau <i>German BundesJetag</i> , akademis dll.	Munich, Jerman
Pertemuan Parlemen Eropa	2018	• Dihadiri oleh <i>Unrepresented Nations and Peoples Organisation</i> (UNPO), Human Rights Watch (HRW), dan Society for Threatened Peoples	
Forum Minoritas di PBB	2018		Stockholm, Sweden

(Diolah dari berbagai sumber)

WUC juga menyelenggarakan sidang umum atau *General Assembly* ke-6 di Munich, Jerman. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 perwakilan WUC dari 18 negara. Kegiatan ini berfokus untuk menyusun isu dan strategi yang akan diprioritaskan dalam misi WUC dalam mempromosikan hak asasi manusia. Salah satu pencapaian yang di bahas dalam pertemuan ini ialah keberhasilan WUC beserta UNPO dalam membentuk *Uyghur Friendship Group* di dalam Parlemen Eropa (*World Uyghur Congress*, 2017).

Forum internasional lain yang dihadiri WUC ialah pertemuan yang diselenggarakan oleh panitia kecil terkait hak asasi manusia di Parlemen Eropa pada Mei 2018 lalu. Pertemuan ini diisi oleh beberapa tokoh penting seperti Sophie Richardson (Direktur Tiongkok dari *Human Rights Watch*), Ulrich Delius (Direktur dari *Society for Threatened Peoples*), dan Dolkun Isa (Presiden WUC). Pertemuan ini membahas kebijakan Tiongkok yang semakin membatasi kebebasan dan menekan kehidupan beragama muslim Uyghur. Dalam dialog tersebut Ulrich Delius menyampaikan bahwa wilayah Xinjiang telah mengalami kontrol total dan dikekang dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kebebasan beropini, kebebasan bergerak serta kebebasan beragama. Sophie Richardson juga mendesak Uni Eropa untuk menuntut Tiongkok pada dialog dan pertemuan yang akan diadakannya. Tuntutan tersebut terkait menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan membebaskan para akademis dan jurnalis yang di tahan seperti Ilham Tohti dan Gao Zisheng (UNPO, 2018).

WUC telah berhasil berpartisipasi dalam forum yang disediakan oleh PBB terkait minoritas. Dolkun Isa sebagai presiden WUC mengisi forum tersebut dengan membahas bagaimana terbatasnya hak masyarakat muslim Uyghur untuk

mempelajari bahasa daerahnya, semenjak Tiongkok mengimplementasikan sistem pendidikan bilingual. Selain itu Tiongkok telah melanggar penggunaan bahasa Uyghur di wilayah Hotan sejak bulan September 2017 (World Uyghur Congress, 2018).

2.3.3. Demonstrasi

Terdapat banyak demonstrasi yang diselenggarakan oleh organisasi Uyghur di berbagai negara untuk menarik simpati masyarakat global, aktivis maupun akademis. Beberapa dari demonstrasi tersebut bersifat lokal ataupun menyeluruh di berbagai negara. Terdapat beberapa demonstrasi di mana WUC turut berpartisipasi. Demonstrasi ini membahas permasalahan seperti pemaksaan kembali masyarakat muslim Uyghur yang tinggal di luar *Xinjiang (Forced Return)*, dan keberadaan kamp reedukasi. Beberapa masyarakat Uyghur yang bersekolah di luar negeri seperti Mesir ataupun Turki dipaksa untuk kembali ke Xinjiang dan dihukum penjara. Salah satu dari mereka yaitu Buzainafu Abudourexiti yang menempuh pendidikan di Mesir selama dua tahun lalu dipaksa pulang pada tahun 2015 dan menerima hukuman penjara selama tujuh tahun melalui pengadilan tertutup (Amnesty International, 2017). Mereka yang memiliki keluarga yang sedang bersekolah ataupun bekerja di luar negeri akan diinterogasi, ditahan dan bisa saja dipenjarakan tanpa adanya pengadilan yang jelas. Beberapa kegiatan demonstrasi tersebut ialah :

Tabel 2.5. Aktivitas *World Uyghur Congress*

Aktivitas	Tahun	Kerja sama	Tempat
Tuntutan terhadap Tiongkok	2017	<ul style="list-style-type: none"> •Amnesti International •<i>Uyghur Human Rights Project (UHRP)</i> •<i>Reporters Without Borders</i> dll. 	

Demonstrasi	2018	• <i>Uyghur American Association</i> (UAA)	Amerika Serikat, Norwegia, Turki, Jerman dll
	2018	• <i>Uyghur Human Rights Project</i> (UHRP) • <i>Unpresented Nations and Peoples Organisation</i> (UNPO)	Jenewa, Swiss

(Diolah dari berbagai sumber)

Pada tahun 2017 lalu, WUC bersama organisasi lainnya seperti Amnesty International, *Uyghur Human Rights Project* (UHRP) , *Reporters Without Borders* dsb menuntut Tiongkok untuk melepaskan Profesor Ilham Tohti yang ditangkap pada tahun 2014 dan dipidana seumur hidup. Ilham Tohti merupakan cendekiawan yang banyak mengangkat isu antara kaum Uyghur dan Han serta ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat di Xinjiang (World Uyghur Congress, 2017).

Selain itu terdapat dua demonstrasi yang diikuti oleh WUC, demonstrasi pertama pada tahun 2018 diadakan oleh *Uyghur American Association* yang berjudul *One Step One Voice*, Demonstrasi ini dilakukan di 13 negara termasuk Amerika Serikat, Norwegia, Turki, Jerman dll. Demonstrasi tersebut berupaya mengangkat kasus ditahannya beberapa individu Uyghur penting seperti jurnalis maupun aktivis. Mereka yang tertangkap akan dimasukkan ke dalam kamp edukasi (World Uyghur Congress, 2018).

Demonstrasi kedua diadakan di tahun yang sama, WUC bekerja sama dengan *Unpresented Nations and Peoples Organisation* (UNPO) mengundang masyarakat global untuk berpartisipasi terhadap demonstrasi yang akan dilakukan di Jenewa, Swiss. Demonstrasi ini berfokus terhadap isu penahanan massal masyarakat

Uyghur di kamp pendidikan Tiongkok yang telah mencapai 1 juta jiwa. Demonstrasi ini dilakukan berhubungan dengan akan dilaksanakannya *Universal Periodic Review* Tiongkok yang merupakan mekanisme yang dimiliki Dewan Hak Asasi PBB. Peninjauan ini dimanfaatkan oleh PBB dan organisasi pemangku kepentingan atau *stakeholders* untuk mempertanyakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Melalui demonstrasi tersebut WUC bersama masyarakat muslim Uyghur lainnya ingin menuntut beberapa hal seperti menghapus keberadaan kamp detensi dan menghentikan kebijakan asimilasi di Xinjiang (World Uyghur Congress, 2018).

Respons Tiongkok terhadap hal ini ialah kamp tersebut didirikan sebagai salah satu program dalam kebijakan de-ekstremisasinya. Namun keputusan pemerintah Tiongkok untuk menolak inspeksi independen dari media ataupun organisasi internasional seperti PBB terkait kamp tersebut meningkatkan kecurigaan masyarakat internasional. Hal ini menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran akan adanya pelanggaran hak asasi dan kemungkinan terjadinya penyiksaan di dalam kamp tersebut. Oleh karena itu banyak organisasi internasional meminta pemerintah Tiongkok untuk menutup fasilitas tersebut (Human Rights Watch, 2018, hal.3).

Melalui penjelasan di atas, WUC terlihat bukan hanya berkomunikasi dengan organisasi transnasional Uyghur lainnya, namun juga aktif berkolaborasi dengan organisasi ataupun asosiasi yang berfokus dalam membahas hak asasi manusia seperti *National Endowment for Democracy* (NED), *Rafto Foundation for Human Rights*, organisasi yang membela individu atau etnis yang tidak memiliki representasi dan *Unrepresented Nations and People Representation* (UNPO),

Parlemen Eropa, Badan Traktat PBB dll. Mengikuti perkembangan, kegiatan serta aktivitas yang terus dijalankan oleh WUC, organisasi ini telah berhasil mengembangkan jaringannya dan mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi yang cukup kuat.

Organisasi di atas tentunya memiliki *platform* berpengaruh untuk mengangkat isu diskriminasi terhadap masyarakat muslim Uyghur ini agar lebih dikenal oleh masyarakat internasional. Melalui perkembangan teknologi serta semakin besarnya wawasan masyarakat global akan keadaan di Xinjiang, WUC berharap mendapat dukungan yang semakin besar untuk menekan pemerintah Tiongkok baik untuk menghentikan segala tindakan yang melanggar hak asasi masyarakat muslim Uyghur atau memberikan laporan yang jelas dan jujur mengenai keadaan yang sebenarnya di Xinjiang.

BAB III

ANALISIS *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK*

TERHADAP UPAYA *WORLD UYGHUR CONGRESS (WUC)*

Melalui situsnya *World Uyghur Congress* menjelaskan bahwa misi utamanya ialah mempromosikan demokrasi dan menegakkan hak asasi masyarakat muslim Uyghur dengan cara yang damai. Dalam menjalankan kegiatannya WUC aktif bekerja sama dengan aktor di dalam jaringan transnasional yang tersebar di seluruh dunia. Keberadaan jaringan ini mempermudah perencanaan program dan strategi yang akan diimplementasikan oleh WUC. Melalui negosiasi maka langkah selanjutnya ialah mengadakan dialog, seminar ataupun pelatihan yang akan memperluas jaringan dan memperkuat strategi dan pengaruh yang mereka miliki.

Bab ini akan menganalisis kegiatan WUC dengan organisasi lainnya dengan menggunakan empat taktik yang dijabarkan oleh Keck & Sikkink yaitu : Politik Informasi, Politik Simbolis, dan Politik Pengaruh (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.95). Setelah melakukan analisis komprehensif maka akan terlihat seberapa besar kesuksesan WUC dalam mengangkat isu ini. Keck & Sikkink menjelaskan parameter kesuksesan yang dapat diberikan suatu jaringan ke dalam beberapa tahapan yaitu :

- 6) Menciptakan isu dan menetapkan sebuah agenda
- 7) Mempengaruhi posisi aktor baik negara ataupun organisasi internasional dalam suatu isu
- 8) Mempengaruhi prosedur atau sistem secara institusional
- 9) Mempengaruhi perubahan kebijakan terhadap aktor yang menjadi target
- 10) Mempengaruhi perilaku suatu negara

Melalui analisis dampak dan pengaruh yang telah dicapai suatu jaringan maka dapat terlihat seberapa besar keterlibatan dan upaya jaringan tersebut dalam mengangkat dan menyelesaikan isu tersebut. (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal. 98)

3.1. Politik Informasi

Dalam taktik ini, kemampuan yang paling sering diterapkan ialah strategi persuasi. Sebagai jaringan yang bergantung dengan informasi yang mereka miliki, para aktor seperti NGO ataupun aktivis harus bisa merancang bagaimana informasi ini jatuh ke tangan publik. Jaringan tersebut tidak hanya ingin memperluas wawasan masyarakat umum mengenai isu yang mereka bicarakan, namun juga memperbesar dukungan dan mengajak mereka untuk ikut bergerak dalam mencari solusi.

Aktor ini harus dapat menyisipkan pesan yang kuat melalui informasi yang diberikan tersebut. Salah satu caranya ialah mencari testimoni dari individu/kelompok yang terpengaruh oleh isu tersebut sehingga menjadi cerita yang lebih menarik simpati. Informasi yang dimiliki oleh jaringan ini merupakan informasi yang eksklusif dan aktual, maka para aktor berfokus dalam menyaring dan menemukan narasumber yang memiliki cerita yang bisa digunakan. Dalam memastikan keberlangsungan dan kesuksesan taktik ini, Keck & Sikkink menitikberatkan dua faktor yang penting dimiliki oleh suatu jaringan yaitu :

3.1.1. Lancarnya arus informasi

Keck & Sikkink menjelaskan bahwa di abad 20-an organisasi dalam jaringan ini juga berupaya dalam menyebarkan informasi ke dalam wilayah yang susah dijangkau (Keck, M. & Sikkink, K., 1999, hal.96). Namun hal ini

tidak lagi menjadi masalah karena kecanggihan teknologi dan internet telah mempermudah mobilisasi informasi ke seluruh penjuru dunia. Setelah informasi tersebut disusun menjadi cerita yang diinginkan, jaringan ini akan mendapat peluang kerja sama baru melalui media, aktivis, ataupun organisasi lain yang tertarik dengan isu tersebut.

Lancarnya arus informasi di abad ini mempermudah WUC menyebarkan informasi melalui beberapa *platform* media sosial yang mereka miliki seperti *website*, *twitter* dan *youtube*. Lewat situs resminya WUC menginformasikan terkait kegiatan yang mereka adakan serta menyediakan laporan-laporan yang dapat dibaca oleh publik (World Uyghur Congress, 2020). Melalui *twitter* WUC selalu memberikan perkembangan terbaru yang terjadi di dalam Xinjiang serta di dunia internasional dan melalui *youtube*, WUC menyediakan informasi melalui testimoni dari sumber yang mereka miliki. Berdasarkan informasi yang disediakan pada beberapa *platform* di atas, WUC mengajak masyarakat global untuk terlibat dalam upaya menuntut ditegakkannya hak asasi masyarakat muslim Uyghur.

Selama tahun 2014-2018, WUC bersama organisasi lainnya telah menjalankan strateginya dalam menciptakan suatu isu atau *framing issue* yang paling menarik perhatian khalayak massa. Terdapat beberapa permasalahan utama yang ingin WUC fokuskan di beberapa tahun terakhir yaitu :

- Isu kebijakan de-esktremisasi
- Isu krisis budaya kaum Uyghur
- Isu kamp edukasi dan *Forced Return*.

WUC menekankan pentingnya mencari resolusi dan penyelesaian akan permasalahan di atas sebagai tahap awal dalam menyelesaikan isu diskriminasi masyarakat Uyghur di Xinjiang. Konferensi dan seminar yang diadakan juga menjadi wadah bagi WUC dan organisasi lain untuk mendiskusikan strategi selanjutnya melalui informasi terbaru yang mereka miliki. Contohnya ialah seperti konferensi sekaligus *workshop* pada tahun 2017 lalu, di mana WUC bersama organisasi lain seperti *National Endowment for Democracy* (NED), *Sweden Uyghur Education Union*, *Unrepresented Nations and Peoples Organization* (UNPO) serta *Uyghur Human Rights Project* (UHRP) berbagi informasi dan wawasan terkait strategi dalam melakukan kegiatan advokasi di dalam forum internasional. (World Uyghur Congress, 2017)

3.1.2. Menjalinkan hubungan kerja sama dengan organisasi domestik sebagai sumber informasi

Keck & Sikkink juga menekankan pentingnya menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi domestik untuk menutupi kekurangan staf dalam mencari informasi. Apabila memiliki sumber langsung dari organisasi domestik tentunya suatu jaringan akan mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh dan autentik. WUC mengupayakan hal ini dengan memperluas jaringan yang dimiliki terhadap organisasi dalam di Xinjiang seperti organisasi *Uyghur Mother Language Based Education*, yang bertujuan untuk mengajarkan generasi muda di Xinjiang mengenai bahasa ibu mereka. WUC bekerja sama dengan narasumber dari pihak organisasi tersebut demi mendapatkan informasi mengenai keadaan edukasi serta krisis budaya dan

bahasa Uyghur di Xinjiang. Informasi yang didapat ini dirangkum menjadi sebuah laporan yang dikeluarkan pada tahun 2014. Melalui laporan yang berjudul *Movement For Uyghur Mother Language Based Education*, WUC mengangkat bagaimana pemerintah Tiongkok telah melanggar hak asasi budaya kaum minoritas melalui implementasi kebijakan edukasi bilingual (World Uyghur Congress, 2014).

WUC juga mengangkat isu ini di beberapa konferensi seperti konferensi berjudul *Uyghur Linguistic Rights Under Assault: Uyghur Language & Cultural Rights In East Turkestan* yang dilaksanakan di Norwegia pada lalu serta forum minoritas PBB yang diisi oleh ketua dari WUC, Dolkun Isa. WUC menekankan pentingnya melestarikan kebudayaan Uyghur di kondisi yang melanda muslim Uyghur saat ini, serta bagaimana pemerintah semakin membatasi acara dan praktik kebudayaan Uyghur dilaksanakan di wilayahnya sendiri (World Uyghur Congress, 2018).

3.2. Politik Simbolis

Taktik ini digunakan ketika suatu organisasi ataupun kelompok aktivis menggunakan sebuah kejadian atau peristiwa untuk menarik perhatian massa terkait isu yang mereka miliki. Keck & Sikkink mengumpamakan taktik ini dengan kejadian pada pertengahan abad 20 seperti kasus *Watergate* , upayag Vietnam serta kudeta di Chili yang memancing masyarakat internasional untuk mendirikan gerakan hak asasi manusia di Amerika Serikat (Keck, M. & Sikkink, K., 1999,hal.97).

Jika menganalisis aktivitas dan upaya WUC antara tahun 2014-2018, dapat disimpulkan bahwa WUC tidak pernah menjalankan taktik ini. Taktik ini dilakukan

oleh organisasi seperti UNPO (*Unrepresented Nations and Peoples Organization*). Organisasi yang memiliki visi & misi yang lebih luas ini bertujuan untuk merepresentasikan negara/masyarakat minoritas (UNPO, 2015, hal.3). Upaya yang telah dilakukannya ialah seperti mengangkat beberapa kasus diskriminasi beberapa tahun silam seperti diskriminasi terhadap kaum Rohingya, Catalonia, Tibet dan juga Xinjiang (UNPO & ANC, 2019) untuk memperluas kesadaran global akan salah satu visi & misi mereka yaitu, menghentikan diskriminasi tak berdasar terhadap kaum minoritas.

Namun, apabila dibandingkan dengan UNPO, tujuan WUC jika dilihat berdasarkan gerakan dan aktivitasnya dalam beberapa tahun silam ini cenderung lebih sempit yaitu memperluas dukungan dan menyebarkan informasi akan dampak kebijakan *Strike Hard Campaign*. Berbagai informasi dan demonstrasi dilakukan untuk mengungkap betapa menekannya kebijakan pemerintah Tiongkok yang kian hari semakin menyempitkan ruang gerak masyarakat Uyghur. Namun dari segelintir aktivitas tersebut WUC hampir tidak pernah mengaitkan isu yang terjadi di belahan dunia lain dengan isu diskriminasi Uyghur di Xinjiang.

Beberapa tulisan yang ditulis oleh WUC memang mengaitkan kebijakan pusat yang mendiskriminasi masyarakat Tibet dan kondisi yang dialami Xinjiang pada saat ini (World Uyghur Congress, 2016, hal.6). Namun informasi tersebut hanya digunakan sebagai argumen pendukung dalam membuktikan bahwa kebijakan yang diupayakan Tiongkok telah menyimpang dari tujuan anti terorisme ataupun tindakan mencegah ekstremisme. Informasi yang disajikan oleh WUC sangat berfokus dalam membahas dan menganalisis ketidakadilan apa saja yang telah diterima masyarakat Uyghur, kegagalan pemerintah Tiongkok dalam

melindungi masyarakatnya dan tindakan apa yang telah dijalankan aktor internasional seperti negara, IGO ataupun NGO dalam mengangkat isu ini.

3.3. Politik Pengaruh

Melalui taktik ini aktor akan menekan target yang mereka inginkan untuk mengubah kebijakan, strategi ataupun melakukan sesuatu yang berpihak pada keuntungan mereka. Keck & Sikkink menjelaskan bahwa suatu organisasi bisa memiliki kemampuan untuk menuntut suatu hal kepada organisasi yang lebih kuat ataupun negara apabila organisasi ini memiliki status, ataupun memiliki ciri khas tertentu yang tidak dimiliki organisasi lainnya. Keck & Sikkink menjelaskan dua jenis pengaruh yang dapat menekan aktor yang lebih kuat :

3.3.1. Pengaruh Material

Pengaruh material dicapai dengan menawarkan bantuan uang, barang ataupun dukungan kepada organisasi/negara lain di dalam dunia politik global. Keck & Sikkink mengilustrasikannya dalam isu hak asasi manusia, taktik ini bisa dilakukan kepada negara dengan menuntut ditariknya angkatan militer mereka di daerah yang memiliki isu pelanggaran hak asasi. Apabila upaya *deterrence* atau pencegahan ini diabaikan oleh negara tersebut maka mereka akan berisiko terkena embargo ekonomi dari negara lain ataupun merusak hubungan bilateral dan multilateral dengan aktor transnasional lain.

3.3.2. Pengaruh Moral

Sedangkan pengaruh moral disebut juga oleh Keck & Sikkink sebagai *mobilisation of shame* di mana suatu aktor baik organisasi maupun negara harus memperhitungkan kritik dari masyarakat internasional dalam

menjalankan suatu kebijakan. Pengaruh ini biasanya memanfaatkan tekanan dari aktor global dan norma universal yang dimilikinya untuk menekan suatu negara dalam menjalankan suatu kebijakan.

Melalui penjelasan dari dua kategori di atas, WUC cenderung menjalankan taktik ini dengan mengandalkan pengaruh moral melalui kampanye serta demonstrasi. Contohnya ialah demonstrasi yang diadakan pada Maret dan November 2018 lalu yang menuntut Tiongkok untuk mengeluarkan informasi yang transparan terkait alasan ditahannya beberapa jurnalis serta aktivis penting Uyghur. Demonstrasi pada Maret 2018 diadakan di 13 negara dengan tujuan memperluas pengaruh dan dukungan dari organisasi, aktivis ataupun individu yang tertarik dengan isu ini (World Uyghur Congress, 2018). Demonstrasi pada November 2018 diadakan oleh WUC bersama UNPO di Jenewa, Swiss dengan mengundang masyarakat global untuk ikut mengecam Tiongkok untuk menutup kamp pendidikan yang diduga telah menahan 1 juta jiwa (World Uyghur Congress, 2018).

Kedua demonstrasi ini merupakan upaya mengaplikasikan pengaruh moral dengan mengandalkan desakan dari masyarakat global, apabila pemerintah Tiongkok tidak menanggapi sahutan tersebut, maka akan mempengaruhi nama baik Tiongkok. WUC juga menghimbau Uni Eropa untuk mengangkat isu di Xinjiang ini melalui Dialog Hak Asasi UE - Tiongkok yang diadakan pada 2018 lalu. WUC menekankan pentingnya keterlibatan Uni Eropa sebagai aktor pembela Hak Asasi Manusia dan juga organisasi berpengaruh untuk mendesak Tiongkok (Irwin, 2017).

3.4. Politik Akuntabilitas

Upaya ini biasa dilakukan suatu jaringan organisasi dengan menuntut tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan. Organisasi

tersebut akan membahas janji, rekomendasi ataupun diskusi yang diterima oleh suatu pemerintah beberapa waktu yang lalu dan membandingkannya dengan keadaan sekarang. *World Uyghur Congress* menganalisis empat rekomendasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di Xinjiang antara tahun 2014-2018 yaitu:

3.4.1. Menghentikan Pengawasan Ketat terhadap masyarakat Uyghur

Dalam laporannya yang berjudul *World Uyghur Congress Submission to the 3rd Universal Periodic Review (UPR) Of People's Republic of China*, WUC membahas beberapa rekomendasi yang telah diterima oleh Tiongkok. Pada sesi sebelumnya Tiongkok menerima rekomendasi dari berbagai negara seperti Jerman, Australia, Amerika Serikat, Timur Leste, Sweden dll. Beberapa rekomendasi tersebut membahas hal-hal terkait menghentikan pengawasan ketat terhadap muslim Uyghur.

WUC menjelaskan implementasi yang tidak sejalan dengan rekomendasi tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh WUC, contohnya ialah *Integrated Joint Operations Platform (IJOP)* yaitu program pemerintah pusat yang menganalisis data penduduknya dan mengumpulkan data tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Program ini akan mengumpulkan daftar orang yang dianggap berbahaya lalu polisi yang berwenang akan menginterogasi dan menahan mereka. Definisi “berbahaya” dalam kasus ini tentunya menimbulkan pertanyaan karena Tiongkok menganggap setiap orang yang tidak melakukan aktivitas normal, seperti membayar hutang ataupun listrik sebagai indikasi bahwa seseorang tersebut menyembunyikan sesuatu (Human Rights Watch, 2018, hal.17).

WUC juga menyediakan informasi terkait pengambilan data secara masif terkait masyarakat dari umur 12-65 tahun pada 2017 lalu. Pemerintah Tiongkok

telah menjalankan program yang mengawasi seluruh masyarakat Uyghur melalui kamera CCTV serta *software* yang dapat mengidentifikasi wajah masyarakatnya. CERD menekankan dalam rekomendasi ke-41 bahwa Tiongkok dianjurkan untuk menghentikan pengambilan data masyarakat yang bersifat memojokkan ras tertentu, data yang telah dikumpulkan itu pun harus diproses secara profesional dan tidak dijadikan alat untuk menangkap individu yang dicurigai pemerintah masuk ke dalam kategori ”abnormal” atau “mencurigakan” (CERD, 2018, hal.8).

3.4.2. Menghormati Hak Kaum Minoritas

Berdasarkan rekomendasi yang diterima pada Tinjauan Berskala Universal (*Universal Periodic Review*) sebelumnya Tiongkok juga tidak memegang janjinya untuk menghormati hak kaum minoritas. Hal ini diangkat WUC dalam konferensi pada tahun 2018 yang berjudul , *Religious Freedom and Cultural Values Under Siege* yang membahas peraturan baru mengenai pelanggaran penggunaan atribut keislaman sebagai upaya mencegah ekstremisme (World Uyghur Congress, 2018).

Gambar 3.1. Lima contoh Tindakan Ekstremisme



Sumber : (Patrick Meyer, 2016,hal.9)

Poster di atas berjudul 5 aktivitas yang dianggap memicu gerakan ekstremisme yaitu :

- 1) Menggunakan pakaian tradisional islam,
- 2) Menggunakan Niqab,
- 3) Menggunakan Hijab,
- 4) Memiliki Jenggot,
- 5) Memakai baju dengan motif bulan atau bintang

Setiap orang yang mencoba menggunakan hijab, niqab, menumbuhkan jenggot atau menggunakan asesoris yang bersifat keagamaan akan ditahan dan diinterogasi (Sophie Richardson, 2017). Selain itu Tiongkok juga menghancurkan tempat dan bangunan bersejarah di wilayah Kashgar dan komunitas tempat tinggal masyarakat Uyghur tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Kebijakan ini menghancurkan peninggalan budaya yang menjadi warisan identitas masyarakat muslim Uyghur (Uyghur Human Rights Project, 2012, hal.3).

3.4.3. Kamp Reedukasi yang sesuai dengan Standar Internasional dan mengadopsi definisi penyiksaan dari *Committee Against Torture (CAT)*

WUC membahas permasalahan ini melalui laporan yang berjudul *Submission to the United Nations Committee Against Torture (CAT)* pada tahun 2015 lalu. Laporan yang diserahkan bersama *Uyghur Human Rights Project (UHRP)* ini memberikan informasi dan saran mengikuti sesi yang akan dilakukan dengan pemerintah Tiongkok pada Desember 2015 lalu.

Dalam laporan ini WUC menjelaskan bagaimana Tiongkok yang telah meratifikasi *Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* pada tahun 1988 masih memiliki peraturan dan kebijakan yang tidak sesuai dengan beberapa pasal dalam konvensi tersebut. Salah satunya

ialah definisi penyiksaan yang dimiliki oleh pemerintah yang dianggap masih tidak mencakup beberapa jenis penyiksaan.

Definisi yang terlalu luas ini mempermudah Tiongkok dalam melakukan interogasi dengan mengandalkan bentuk penyiksaan lain, contohnya seperti penyiksaan psikologis (Human Rights Watch, 2018, hal.2). Tuntutan kepada Tiongkok untuk memperbarui definisi terhadap penyiksaan ini telah disampaikan oleh komite pada sesi sebelumnya pada tahun 2000 dan 2008. WUC pun mengangkat isu ini karena kekhawatiran akan adanya upaya menarik pengakuan melalui penyiksaan terhadap para tahanan Uyghur.

Dalam rekomendasi Tinjauan Berskala Universal sebelumnya pada tahun 2013 lalu, Tiongkok boleh mendirikan kamp reedukasi apabila telah memenuhi standar internasional. Standar tersebut contohnya seperti akses terhadap pengacara dan tidak adanya interogasi melalui penyiksaan fisik ataupun penyiksaan psikologis. Namun ternyata pemerintah memperbolehkan pihak berwenang di Tiongkok untuk menolak permintaan tahanan terhadap akses ke pengacara, hal ini dikhawatirkan WUC dapat menjadi celah yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk melakukan interogasi dengan melakukan penyiksaan fisik & psikologis tersebut (World Uyghur Congress, 2018, hal.2).

WUC juga membahas hal ini melalui laporan berjudul *Parallel Submission to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) for the People's Republic of China (PRC)*. Isu diatas kembali diangkat dalam tinjauan CERD pada 2018 lalu. Melalui tinjauan pada tahun 2009, CERD telah memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan observasi yang dilakukan. Salah satunya ialah rekomendasi ke-17, CERD mendesak Tiongkok untuk memberikan laporan

transparan terkait keadaan tahanan yang ditangkap setelah kerusuhan Urumqi pada tahun 2009, memberikan akses untuk memiliki pengacara serta pemberlakuan secara manusiawi kepada tahanan berdasarkan yang ditetapkan oleh hukum internasional (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), 2009, hal.4). Pada dokumen observasi CERD 2018, rekomendasi ke-39 masih melihat bahwa Tiongkok belum menyediakan akses kepada tahanan untuk menyewa pengacara (CERD, 2018, hal.7)

WUC mencontohkan permasalahan di atas melalui kasus Ilham Tohti, salah satu figur cendekiawan dan ahli perekonomian Uyghur yang ditahan dan ditolak melakukan kontak dengan pengacaranya. Hal ini didukung oleh informasi dari *Human Rights Watch* (HRW) yang menyatakan bahwa Ilham Tohti ditahan pada bulan Januari 2014 dengan tuduhan mendukung terorisme dan separatisme (Human Rights Watch, 2014). Ia juga tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan pengacaranya selama lima bulan. *Human Rights Watch* (HRW) menjelaskan bahwa menurut informasi dari pengacara tersebut, Ilham Tohti memang pencetus dari situs *UyghurOnline* yang berisi tulisan kritis terkait permasalahan antara pemerintah dan masyarakat Uyghur.

Namun melalui tulisan-tulisan tersebut Tohti tidak pernah mengusulkan jalan kekerasan ataupun menekankan bahwa ia ingin Xinjiang independen dan terlepas dari pemerintah Tiongkok. Tohti berupaya penting dalam mengajak masyarakat Uyghur untuk melakukan debat secara damai serta sering kali memberi solusi terkait permasalahan diskriminasi ekonomi pada masyarakat muslim Uyghur (Richardson, 2016).

Selain itu, Tiongkok justru meningkatkan jumlah kamp reedukasi di penjuru wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok menyatakan tujuan dari dibentuknya kamp ini ialah untuk memperbaiki pendidikan tahanan yang telah terpapar pengaruh ekstremis, namun masyarakat internasional menduga kamp ini mendoktrin tahananannya secara politis dan menggunakan bentuk interogasi yang melanggar hak asasi manusia. Dugaan ini didukung oleh testimoni yang dimiliki oleh WUC serta organisasi lain seperti *Human Rights Watch* (HRW).

Dalam laporannya yang berjudul *Eradicating Ideological Viruses*, HRW melampirkan informasi yang didapat dari 58 narasumber, lima orang di antaranya pernah di tahan dan 38 orang memiliki keluarga yang sedang ditahan di kamp detensi di Xinjiang (Human Rights Watch, 2018, hal.7). Mereka yang ditahan dipaksa untuk menghafal 1000 huruf Mandarin, menyanyikan lagu propaganda yang memuji Partai Komunis Tiongkok dan Presiden. Mereka juga tidak boleh berbicara menggunakan bahasa mereka ataupun mengucapkan seruan religius seperti salam, hamdalah dsb (Human Rights Watch, 2018, hal. 38).

3.4.4. Menghentikan Tindakan *Forced Return*

Kasus pemaksaan kembali atau *forced return* juga diangkat oleh beberapa negara termasuk rekomendasi dari Amerika Serikat pada sesi Tinjauan Berskala Universal (*Universal Periodic Review*) sebelumnya. Amerika merekomendasikan Tiongkok untuk menghentikan tindakan yang menangkap para aktivis hak asasi manusia ataupun menyiksa keluarga dari para aktivis yang bersangkutan. Namun setelah menerima rekomendasi ini terdapat beberapa kasus berkaitan ekstradisi *refugee* secara paksa. Salah satu contohnya ialah 109 pencari suaka yang dipaksa

kembali dari Thailand pada tahun 2014. Mereka yang dipaksa kembali tersebut tidak terdengar lagi keberadaannya (Human Rights Watch, 2015).

Terkait permasalahan ini, WUC juga membahas pelanggaran prinsip *non-refoulement* terkait *refugee* Uyghur yang berada di negara tetangga. Prinsip ini berasal dari Konvensi Jenewa tahun 1951 pasal 33 ayat 1 terkait perlindungan terhadap *refugee* (Lauterpacht & Bethlehem, 2003) yang berbunyi:

“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his [or her] life or freedom would be threatened on account of his [or her] race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”
(United Nations High Commissioner & for Refugees, 1967, hal.2)

Melalui prinsip *non-refoulement* suatu negara dilarang mengembalikan *refugee* yang berada di wilayah teritori mereka kepada negara asal yang berkemungkinan menyiksa dan membatasi hak asasinya (Schmahl, 2006, hal.40). Tuntutan ini menjadikan prinsip tersebut termasuk *jus cogens* atau *peremptory law* yang berarti mengikat seluruh negara walaupun negara tersebut tidak meratifikasi konvensi yang bersangkutan (Jastram & Achiron, 2001).

Human Rights Watch juga pernah mengirimkan surat terkait permasalahan ini ke Uni Eropa pada 2018. HRW mendesak negara-negara di Eropa untuk melindungi para *refugees* yang berada di negaranya. HRW menekankan kewajiban negara-negara tersebut untuk mengikuti konvensi jenewa terkait pengungsi tersebut. Sebisanya mungkin negara tersebut harus melindungi para *asylum seeker* serta *Refugees* yang berasal dari Xinjiang (Human Rights Watch, 2018).

Tiongkok melanggar prinsip ini dengan dugaan menggunakan hubungan ekonomi serta kedudukannya untuk memaksa negara-negara tersebut mengembalikan masyarakat Uyghur yang berada di teritorinya (The World Uyghur

Congress (WUC) & The Uyghur Human Rights Project (UHRP), 2015, hal.8). Namun WUC juga menambahkan kekecewaannya akan belum adanya badan pengawasan resmi antar-negara yang dapat bergerak mengadili negara yang telah melanggar konvensi 1951 terkait *refugee* tersebut. WUC menambahkan bahwa kenyataannya suatu negara bisa mengangkat kasus ini ke *International Court of Justice* (ICJ) (Charlesworth & Chinkin, 1993, hal.66) sebagai badan mediasi ataupun UNHCR, namun belum ada negara yang menggunakan jalur ini untuk menekan Tiongkok (Irwin, 2016, hal.22).

Keberadaan dan ikut campur WUC dalam dialog internasional isu ini sangat signifikan, upaya dan kegiatan yang dijalankan organisasi tersebut merupakan bukti penting akan meningkatnya upaya NGO dalam kancah internasional. Hampir semua penyelesaian isu internasional sekarang terpengaruh oleh advokasi dan rekomendasi dari NGO (Charnovitz, 2006, hal.34). Hal ini karena NGO memiliki tiga ciri khas yaitu 1) Keahlian mendapatkan informasi, 2) Menawarkan jasa kepada masyarakat, 3) Membela suatu nilai atau *value* (Schweitz, 1995). Dengan mengelompokkan kegiatan WUC ke dalam empat taktik di atas, dapat terlihat bahwa WUC lebih cenderung menjalankan taktik Politik Informasi, Politik Pengaruh dan Politik Akuntabilitas. Pengoperasian taktik ini sangat bergantung dengan kemampuan WUC sebagai jaringan organisasi dalam menggali informasi. WUC memanfaatkan jaringan luas yang dimilikinya untuk mencari informasi, merangkai dan menganalisis informasi tersebut menjadi argumen yang kuat, lalu menggunakan informasi tersebut untuk membangun sebuah isu demi menyebarkan kesadaran masyarakat global dan memojokkan pemerintah Tiongkok.

Namun konsep *Transnational Advocacy Network* yang dimiliki Keck & Sikkink bukan hanya menjelaskan pembagian upaya suatu jaringan organisasi namun juga menjelaskan lima level tahapan yang dapat dicapai oleh jaringan tersebut. Jika menganalisis pengoperasian tiga taktik yang dijalankan WUC sejak 2014-2018 melalui lima tahapan pengaruh tersebut, WUC dapat disimpulkan telah memenuhi tahapan 1) Menciptakan isu dan menetapkan sebuah agenda ; dan tahapan 2) Mempengaruhi posisi aktor baik negara ataupun organisasi internasional dalam suatu isu.

Tahapan pertama dapat dicapai oleh WUC dengan melakukan taktik Politik Informasi yaitu terus memberitakan perkembangan terkini isu tersebut melalui *platform* media sosial, mengadakan konferensi, *workshop* dan terlibat dalam forum internasional yang ada. Beberapa upaya dan kegiatan WUC sebelum tahun 2014 cenderung berfokus terhadap isu ketidakadilan serta kesenjangan sosial & ekonomi yang terjadi secara umum di Xinjiang. Namun setelah diimplementasikannya kebijakan *Strike Hard Campaign* pada 2014, WUC berusaha mengarahkan fokus diskusi secara global terhadap dampak negatif dari kebijakan terbaru tersebut.

Melalui keterlibatan WUC di dalam berbagai aktivitas di atas maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menyatukan tujuan dan perhatian aktor seperti negara, organisasi internasional ataupun individu kepada isu yang lebih genting yaitu kebijakan *Strike Hard Campaign*. WUC memanfaatkan posisi, informasi dan testimoni yang mereka miliki untuk menanamkan ide dan opini yang mereka miliki terkait isu ini, bahwa pemerintah Tiongkok telah menyalahgunakan kebijakan anti-terorisnya untuk menekan hak dan identitas masyarakat muslim Uyghur di Xinjiang.

Keputusan pemerintah Tiongkok dalam mengaitkan budaya masyarakat Uyghur yang erat dengan keislaman dan perilaku terorisme menjadi alat yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk menekan hak asasi masyarakat Uyghur. Demi melindungi kedaulatan negara, prasangka atau *prejudice* yang fatal tersebut mengorbankan berbagai hak asasi masyarakat muslim Uyghur baik itu kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak, hingga kebebasan berpendidikan. Melarang penggunaan atribut ataupun praktik keislaman bukanlah strategi yang tepat untuk mencegah “*The Three Evil Forces*” yang dipercayai sebagai separatisme, ekstremisme, dan terorisme (Dupont, 2007).

Pencapaian tahapan kedua oleh WUC dapat dikaji secara langsung dari taktik Politik Pengaruh dan Politik Akuntabilitas, yaitu keberhasilan WUC mendesak Uni Eropa untuk mengangkat pelanggaran hak asasi di Xinjiang dalam Dialog Hak Asasi Tiongkok-UE pada tahun 2018 lalu. Sebelumnya Uni Eropa mendapat kritikan kuat dari organisasi lain serta pengamat politik. Uni Eropa dianggap gagal dalam mendesak Tiongkok untuk memperbolehkan masuknya tim investigasi independen ke dalam wilayah Tiongkok pada sesi *UN Human Rights Council* ke-37 Maret 2018 lalu (Brooks, 2019). Sebelum dialog ini WUC mendorong Uni Eropa untuk membahas isu kamp reedukasi massal yang diduga telah menahan sejuta masyarakat Uyghur.

Dalam pertemuan Dialog Hak Asasi tersebut, perwakilan Uni Eropa mendesak Tiongkok untuk meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah lama ditandatanganinya. Uni Eropa juga mengangkat isu penahanan tokoh-tokoh penting Uyghur seperti Ilham Tohti serta mendorong Tiongkok untuk menghentikan praktik kamp reedukasi yang melanggar hak asasi

masyarakatnya. Selain itu, Uni Eropa juga membahas salah satu kekhawatiran WUC yaitu perihal interogasi melalui penyiksaan serta akses tahanan terhadap pengacara. Uni Eropa menyarankan kepada Tiongkok untuk memperbolehkan investigasi dari pihak luar terkait tuduhan penyiksaan yang dilakukan kepada tahanan. Secara umum Uni Eropa telah menyampaikan beberapa keinginan WUC yaitu mendesak Tiongkok untuk menghormati hak kaum minoritas, hak beragama, hak berserikat dll (European External Action Service, 2018).

Selain itu, badan hak asasi manusia PBB yang telah dikirimkan laporan oleh WUC seperti *Committee Against Torture* (CAT) dan *Comittee on the Elimination of Racial Discrimination* (CERD) juga telah menghimbau Tiongkok pada pertemuan terbarunya terkait beberapa kekhawatiran seperti definisi penyiksaan yang masih belum disesuaikan dengan definisi dari *Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, tidak diberikannya akses terhadap pengacara kepada para tahanan, serta meningkatnya keberadaan kamp reedukasi yang tidak sesuai dengan standar internasional.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Kebijakan anti terorisme sering kali dijadikan alat bagi pemerintah Tiongkok dalam mengatur kehidupan masyarakat Uyghur di Xinjiang. Prasangka yang kuat akan keterkaitan agama islam sebagai salah satu identitas masyarakat Uyghur mengakibatkan munculnya diskriminasi yang melanggar hak beragama hingga menekan kebebasan lainnya seperti kebebasan berpendidikan, kebebasan bergerak serta kebebasan beropini. Mereka yang kabur menjadi salah satu pencetus WUC, organisasi yang bertujuan menegakkan demokrasi dan hak asasi masyarakat Uyghur. Organisasi yang berdiri sejak tahun 2004 ini terus memperluas jaringannya serta aliansi dengan organisasi transnasional lain untuk mengangkat isu ini ke ranah dialog internasional.

Melalui analisis skripsi ini yang berdasarkan konsep *Transnational Advocacy Network* dari Keck & Sikkink, penulis menjelaskan upaya WUC yang sebagai aktor dalam jaringan transnasional. Pada Bab 2 penulis menganalisis efek bumerang yang dimanfaatkan oleh WUC untuk menekan Tiongkok serta pentingnya jaringan transnasional dan aktivitas internasional dalam mempromosikan isu ini ke masyarakat global. Melalui analisis tersebut dapat terlihat bagaimana WUC bekerja sama dengan banyak aktor dalam jaringan transnasional dengan harapan dapat menyatukan solidaritas untuk mendesak pemerintah Tiongkok. pada Bab 3 penulis menganalisis upaya WUC

tersebut ke dalam empat taktik yang digunakan yaitu Politik Informasi, Politik Simbolis, Politik Pengaruh, dan Politik Akuntabilitas. Penulis menemukan jawaban terkait pertanyaan penelitian bagaimana upaya *World Uyghur Congress* dalam mengangkat diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang.

Pertama, dengan melihat aktivitas WUC berdasarkan taktik politik informasi, dapat dimengerti bahwa organisasi ini sangat aktif dalam memberitakan informasi terkini serta perkembangan isu ini kepada masyarakat global. WUC turut berpartisipasi dalam menyediakan informasi dan testimoni yang berasal dari sumber yang dimiliki melalui kerja sama dengan organisasi lokal, dan menganalisis informasi tersebut menjadi cerita yang mudah dipahami oleh massa. Mengikuti arus globalisasi, keberadaan *platform* media sosial serta aktifnya wadah WUC tersebut membuktikan keseriusannya dalam mengayomi individu ataupun pihak yang tertarik akan isu ini untuk mengerti urgensi dari permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Keck & Sikkink mengenai jaringan transnasional yang menggunakan sumber informasinya yang masif untuk menarik perhatian dan melakukan advokasi.

Kedua, terkait dengan politik informasi, WUC tidak terlihat menggunakan taktik ini dalam kurun waktu yang ditentukan. Inti utama dari taktik ini ialah memanfaatkan suatu peristiwa khusus untuk menarik perhatian massa akan isu yang mereka dimiliki. Dalam hal ini WUC tidak menggunakan isu lainnya karena tujuan WUC masih lebih terfokus dalam melakukan analisis komprehensif dari informasi yang dimilikinya dan

menyajikan informasi tersebut dengan tujuan memperluas dukungan yang dimiliki agar dapat menekan pemerintah Tiongkok.

Ketiga, berdasarkan politik pengaruh, upaya WUC dapat dikategorikan dalam taktik pengaruh moral. Melalui demonstrasi yang mengundang masyarakat global, WUC bertujuan melakukan *mobilisation of shame* terhadap pemerintah Tiongkok. Hal ini dirasa penting karena kritik dari masyarakat internasional merupakan faktor penting yang membangun citra suatu negara di era modern ini. Upaya WUC menghimbau Uni Eropa untuk membahas isu ini dalam dialog hak asasi UE-Tiongkok juga dapat dengan mudah dianalisis melalui efek bumerang yang dicetuskan oleh Keck & Sikkink. Melalui efek tersebut dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan WUC merupakan salah satu strategi memberikan pengaruh dari atas “*from above*” dan dari bawah “*from below*” secara bersamaan.

Keempat, WUC telah melakukan persiapan yang matang dalam menjalankan politik akuntabilitas ini. Berdasarkan data yang dimiliki dari narasumber terpercaya dan mengamati aktivitas Tiongkok dalam rezim internasional, WUC menganalisis rekomendasi apa saja yang telah diterima oleh pemerintah Tiongkok dan mempresentasikan kondisi nyata yang terjadi terhadap masyarakat Uyghur di Xinjiang. WUC membahas banyak implementasi kebijakan Tiongkok yang tidak sejalan dengan rekomendasi tersebut, seperti belum mengadopsi definisi penyiksaan yang sesuai dengan konvensi yang ada, tetap mendirikan kamp reedukasi dan tidak memberikan akses yang layak terhadap para tahanan akan pengacara, menerapkan

beberapa peraturan yang melarang aktivitas beragama serta menyerang identitas dan budaya masyarakat muslim Uyghur.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *Transnational Advocacy Network* sesuai untuk menjelaskan upaya WUC dalam mengangkat isu diskriminasi ini. Namun, penulis menemukan bahwa parameter keberhasilan suatu jaringan transnasional yang diuraikan oleh Keck & Sikkink tidak dapat digunakan secara maksimal oleh organisasi selayaknya WUC. Keck & Sikkink memberikan lima tahapan keberhasilan sebuah jaringan transnasional antara lain : 1) Menciptakan isu dan menetapkan sebuah agenda, 2) Mempengaruhi posisi aktor baik negara ataupun organisasi internasional dalam suatu isu, 3) Mempengaruhi prosedur atau sistem secara institusional, 4) Mempengaruhi perubahan kebijakan terhadap aktor yang menjadi target, 5) Mempengaruhi perilaku suatu negara.

WUC hanya memenuhi tahapan satu dan dua dari parameter di atas, hal ini terjadi karena memandang posisi Tiongkok sebagai negara adidaya dengan sektor ekonomi yang kuat tidak bisa dengan mudah dipengaruhi ataupun mematuhi permintaan organisasi internasional seperti WUC yang masih membangun statusnya di kancah internasional. Pemerintah Tiongkok pun berulang kali menekankan pihak eksternal untuk tidak ikut campur dalam permasalahan domestiknya. Parameter kesuksesan jaringan internasional di atas akan lebih cocok digunakan apabila menganalisis organisasi besar selayaknya PBB ataupun organisasi seperti *Amnesty International* atau *Human Right Watch* yang memiliki suara sebagai *stakeholders* dalam

Tinjauan Berskala Universal yang diadakan lima tahun sekali oleh *Human Rights Council*.

4.2. Saran & Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang menyebabkan kesimpulan dari skripsi ini secara spesifik hanya dapat digunakan dalam diskusi terkait upaya WUC dalam kurun waktu tertentu saja. Sehubungan dengan kesadaran global yang semakin meluas beberapa tahun ini lebih baik sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait upaya WUC pada kurun waktu selanjutnya dan membahas upaya dari organisasi lainnya. Hal ini berguna untuk melihat signifikannya dan perkembangan kinerja WUC dan bagaimana organisasi lain membantu dalam mengangkat isu ini ke arah dialog internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Charnovitz, S. (2006). Accountability of Non-Governmental Organizations in Global Governance. In *NGO Accountability Politics, Principles and Innovations* (pp. 21–42).
- Christofferson, G. (2006). *Islam and Ethnic Minorities in Central Asia: The Uyghurs" in Islam, Oil, and Geopolitics*. Boulder: Rowman & Littlefield Publishers.
- Dillon, M. (2004). *Xinjiang – China's Muslim Far Northwest*. London: RoutledgeCurzon.
- Fuller, G. E., & Lipman, J.-N. (2004). Islam in Xinjiang. In S. F. Starr (Ed.), *Xinjiang: China's Muslim borderland* (pp. 1–469). New York: M.E. Sharpe, Inc.
- Khagram, S., Riker, J. V., & Sikkink, K. (2002). From Santiago to Seattle: Transnational Advocacy Groups Restructuring World Politics. In *Social Movements, Protest, and Contention* (pp. 1–357). Minneapolis & London: University of Minnesota Press.
- Lauterpacht, S. E., & Bethlehem, D. (2003). *The Scope and Content of the Principle of Non- Refoulement, United Nations High Commissioner for Refugees*. Cambridge University Press.
- Moloeng, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Reed, J. T., & Raschke, D. (2010). The ETIM: China's islamic militants and the global terrorist threat. ABC-CLIO, 2010. *ABC-CLIO*.
- Risse-Kappen, T. (1995). *Bringing transnational relations back in Non-state actors, domestic structures and international institutions*. Cambridge:

Cambridge University Press.

Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (1999). *The Power of Human Rights : International Norms and Domestic Change*. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmahl, S. (2006). An Example of Jus Cogens: The Status of Prisoners of War. In C. T. & J.-M. Thouvenin (Ed.), *The Fundamental Rules of the International Legal Order* (pp. 1–483). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.

Spence, J. D. (1990). *The Search for Modern China*. WW Norton & Company.

Sugiyono. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan report

Betsill, M. M., & Corell, E. (2008). Introduction to NGO Diplomacy. In London (Ed.), *The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations* (pp. 1–18). The MIT Press.

Castets, R. (2003). The Uyghur in Xinjiang - The Malaise Grows. *China Perspectives*, 49.

CERD. (2018). *Concluding observations on the combined fourteenth to seventeenth periodic reports of China*.

Charlesworth, H., & Chinkin, C. (1993). The Gender of Jus Cogens. *Human Rights Quarterly*, 15, 63–76.

Chen, Y.-J. (2019). China's Challenge to the International Human Rights Regime. *NYU Journal of International Law and Politics*, 51, 1179–1222.

Committee against Torture. (2016). The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) and Thailand. *United Nations*, 01451(February).
https://doi.org/10.1163/9789004326675_007

Hidayat, M. N. (2013). Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang Cina

- Muhammad Nizar Hidayat Peneliti pada Nusantara Strategic House, Samarinda. *Jurnal Interdependence*, 1(No.3 September-Desember), 165–179.
- Irwin, P. (2016). Seeking a Place to Breathe Freely. *World Uyghur Congress*, 1–48.
- Irwin, P. (2017). 2016 Human Rights Situation in East Turkestan. *World Uyghur Congress*, 1–33.
- Jastram, K., & Achiron, M. (2001). Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law. *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, 14(1), 146.
- Keck, M., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 159(marzo), 89–101.
- Kuşçu, I. (2014). The Uyghur Diaspora in Cyberspace: Identity and Homeland Cause. *Bilig, Journal of Social Sciences of the Turkish World*, (69), 143–160.
- Meyer, Patrick. (2016). *China's De-Extremization of Uyghurs in Xinjiang*. (6). Retrieved from <https://na-production.s3.amazonaws.com/documents/Meyer-Uyghurs.pdf>
- Meyer, Patrik. (2012). Governing Muslim Minorities as Security Threats : The Case of the Uyghurs and the Concept of a New Chinese Nation. *PhD Thesis, University of Cambridge*, 64.
- Mumford, A. (2018). Theory-Testing Uyghur Terrorism in China. *Perspectives on Terrorism*, 12(5), 18–26.
- Schweitz, M. L. (1995). NGO Participation in International Governance: The Question of Legitimacy. *The Growing Role of Non-Governmental Organizations, Proceedings of the American Society of International Law*, 89, 413–415.
- Shichor, Y. (2007). Limping On Two Legs: Uyghur Diaspora Organizations And

- The Prospects For Eastern Turkestan Independence. *Central Asia and the Caucasus*, 6(6), 117–125.
- Shir, R. (2019). *Resisting Chinese Linguistic Imperialism: Abduweli Ayup and the Movement for Uyghur Mother Tongue-Based Education*. (May).
- Shukla, A. (2016). the Uyghur (a Troubled Minority of China). *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 15(2), 291–297.
- UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD). (2009). *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination of China (including Hong Kong, China and Macao, China)*. (CERD/C/CHN/CO/10-13). <https://doi.org/10.1038/191236a0>
- UNHRC. (2018). *Matrice Recommendations China*.
- United Nations High Commissioner, & for Refugees. (1967). Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol * In this advisory opinion , the Office of the United Nations High Commissioner for Refu. *Commentary*, 428(October), 1–19.
- United Nations Human Rights Council. (2018). *Compilation Prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights, in Accordance with Paragraph 15(B) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1 (A/HRC/WG.6/31/CHN/2)* (Vol. 13980).
- The World Uyghur Congress (WUC) & The Uyghur Human Rights Project (UHRP). (2015). *Submission to the United Nations Committee Against Torture (CAT) & The Uyghur Human Rights Project (UHRP)*.
- Trédaniel, M., & Lee, P. K. (2018). Explaining the Chinese framing of the “terrorist” violence in Xinjiang: insights from securitization theory. *Nationalities Papers*, 46(1), 177–195. <https://doi.org/10.1080/00905992.2017.1351427>
- UNPO. (2015). *Alternative Report*.

- UNPO, & ANC. (2019). *Assemblea Nacional Catalana (ANC – Catalan National Assembly) & Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO)*. Retrieved from <https://unpo.org/downloads/2562.pdf>
- US Congress. (2018). S.3622 - *Uyghur Human Rights Policy Act of 2018*. Retrieved from <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3622>
- Uyghur Human Rights Project. (2012). *Living on the Margins : The Chinese State 's Demolition of Uyghur Communities*.
- Vergani, M., & Zuev, D. (2011). Analysis of YouTube videos used by activists in the Uyghur nationalist movement: Combining quantitative and qualitative methods. *Journal of Contemporary China*, 20(69), 205–229. <https://doi.org/10.1080/10670564.2011.541628>
- Wiggins, J. (2008). *Survival of Uyghur Ethnic Identity: A Case of Self Preservation*. 36–46.
- World Uyghur Congress. (2014). *Movement for Uyghur Mother Language Based Education*. (February).
- World Uyghur Congress. (2016). *2016 Report on Human Rights Violations in East Turkestan*. (April), 1–21.
- World Uyghur Congress. (2018h). *World Uyghur Congress Submission 3rd Universal Periodic Review (UPR) of the People 's Republic of China (PRC)*. (March).

Artikel

- Amnesty International. (2017). *Uighur Woman Incommunicado After Secret Trial : Buzainafu Abudourexiti*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/7168/2017/en/>
- Brooks, S. (2019). In EU-China Discussions, It's Time Human Rights Took Center Stage. Retrieved from The Diplomats website: <https://thediplomat.com/2019/03/in-eu-china-discussions-its-time-human-rights-took-center-stage/>

Cumming-Bruce, N. (2018). AT U.N., China Defens Mass Detentions on Uighur Muslim. Retrieved from

<https://www.nytimes.com/2018/11/06/world/asia/china-detention-uighur-muslims.html>

Dupont, S. (2007). China's war on the "Three Evil Forces." Retrieved from

Foreign Policy website: <https://foreignpolicy.com/2007/07/25/chinas-war-on-the-three-evil-forces/>

East Turkestan Australian Association. (2018). Etaa Is Planning A Major Rally In Adelaide On Saturday 29th September 2018 To Condemn The Chinese Occupation And Genocide In East Turkistan. Retrieved from

<http://www.etaa.org.au/project/etaa-is-planning-a-major-rally-in-adelaide-on-saturday-29th-september-2018-to-condemn-the-chinese-occupation-and-genocide-in-east-turkistan/>

Eimer, D. (2009). As China reels from 184 deaths in Urumqi riots, a beaten woman fears for her husband. Retrieved from

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/5805352/As-China-reels-from-184-deaths-in-Urumqi-riots-a-beaten-woman-fears-for-her-husband.html>

European External Action Service. (2018). The European Union and China held their annual Human Rights Dialogue. Retrieved from

https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/48217/european-union-and-china-held-their-annual-human-rights-dialogue_tr

Hernández, J. C. (2017). China Bans 'Muhammad' and 'Jihad' as Baby Names in Heavily Muslim Region. Retrieved from

<https://www.nytimes.com/2017/04/25/world/asia/china-xinjiang-ban-muslim-names-muhammad-jihad.html>

Human Rights Watch. (2014). China: Uighur Scholar's Trial a Travesty of Justice.

Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2014/09/15/china-uighur-scholars-trial-travesty-justice>

- Human Rights Watch. (2015). China. Retrieved from <http://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/china-and-tibet#7934d0>
- Human Rights Watch. (2015). Thailand: 100 Ethnic Turks Forcibly Sent to China. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2015/07/09/thailand-100-ethnic-turks-forcibly-sent-china-69>
- Human Rights Watch. (2018). “ *Eradicating Ideological Viruses* .” Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs>
- Human Rights Watch. (2018). China: Big Data Fuels Crackdown in Minority Region Predictive Policing Program Flags Individuals for Investigations, Detentions. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2018/02/26/china-big-data-fuels-crackdown-minority-region>
- Human Rights Watch. (2018). China: Visiting Officials Occupy Homes in Muslim Region. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region>
- Human Rights Watch. (2018). Letter to the EU on Turkic Asylum Seekers Suspend Deportations to China, Expedite Asylum Claims. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2018/12/03/letter-eu-turkic-asylum-seekers>
- Hunter, F. (201). 'China Needs To Be Brought To Account': Federal Mps Urge Tough Response To China's Muslim Crackdown. Retrieved from The Sydney Morning Herald website: <https://www.smh.com.au/politics/federal/china-needs-to-be-brought-to-account-federal-mps-urge-tough-response-to-china-s-muslim-crackdown-20181117-p50gni.html>
- Lee, R. (2015). *Muslims in China and their Relations with the State*. (August). Retrieved from <http://studies.aljazeera.n>
- University of Cambridge, 64.
- Nasaw, D. (2009). Rebiya Kadeer: from Beijing envoy to exiled prisoner of

- conscience. Retrieved from The Guardian website:
<https://www.theguardian.com/world/2009/jul/07/china-clashes-uyghurs-rebiya-kadeer>
- RFA. (2008). World Cannot Turn a Blind Eye: Rebiya Kadeer. Retrieved from Radio Free Asia website:
https://www.rfa.org/english/uyghur/kadeer_reactions-20080319.html
- Richardson, S. (2016). China Wants You to Forget Ilham Tohti. Retrieved from
<https://www.hrw.org/news/2016/09/20/china-wants-you-forget-ilham-tohti>
- Sophie Richardson. (2017). China Bans Many Muslim Baby Names in Xinjiang : Absurd Edict Part of Growing Restrictions on Uyghurs. Retrieved from Human Rights Watch website: <https://www.hrw.org/news/2017/04/24/china-bans-many-muslim-baby-names-xinjiang>
- UAA. (2007). President Bush praises Rebiya Kadeer as a human rights defender. Retrieved from Uyghur American Association website:
<https://uyghuramerican.org/article/president-bush-praises-rebiya-kadeer-human-rights-defender.html>
- United Nations Human Rights Council. (2020). Universal Periodic Review - China. Retrieved from
<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CNIndex.aspx>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2020). China. Retrieved from
<https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/CNIndex.aspx>
- UNPO. (2015). *Alternative Report*.
- UNPO. (2018). Conference at US Congress Highlights Draconic Restrictions on Uyghur Cultural And Religious Freedoms. Retrieved from Unpresented Nations and Peoples Organisation website: <https://unpo.org/article/20647>
- UNPO. (2018). European Parliament Subcommittee on Human Rights Organised Exchange of Views on Human Rights Situation in China with a Special

Focus on Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Retrieved from <https://unpo.org/article/20803>

UNPO. (2018). Uyghur Friendship Group at EP Discusses China's "Re-education" Camps. Retrieved from <https://unpo.org/article/20924>

World Uyghur Congress. (2014). Announcement : UN Training Seminar for Uyghur Youth to be Held in Geneva, Switzerland. Retrieved from <https://www.uyghurcongress.org/en/announcement-uyghur-training-seminar-to-be-held-in-geneva-switzerland/>

World Uyghur Congress. (2017). Civil Society & Scholars Call on China to Immediately Release Uyghur Professor Ilham Tohti Five Years after Arrest. Retrieved from World Uyghur Congress website: <https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-world-uyghur-congress-to-convene-6th-general-assembly-in-munich-germany/>

World Uyghur Congress. (2017). Event Announcement WUC to Hold Youth Training Seminars in Stockholm, Sweden. Retrieved from World Uyghur Congress website: <https://www.uyghurcongress.org/en/event-announcement-wuc-to-hold-youth-training-seminars-in-stockholm-sweden/>

World Uyghur Congress. (2017). Press Release World Uyghur Congress Maintains Momentum Through 6th General Assembly in Munich, Germany. Retrieved from World Uyghur Congress website: <https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-world-uyghur-congress-maintains-momentum-through-6th-general-assembly-in-munich-germany/>

World Uyghur Congress. (2017). World Uyghur Congress Stockholm Youth Advocacy Training Seminar Concludes. Retrieved from World Uyghur Congress website: <https://www.uyghurcongress.org/en/world-uyghur-congress-stockholm-youth-advocacy-training-seminar-concludes/>

World Uyghur Congress. (2018). Press Release : Uyghur Women Organise Worldwide Demonstrations Through "Onve Voice, One Step" Initiative. Retrieved from World Uyghur Congress website:

<https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-uyghur-women-and-children-to-hold-worldwide-demonstrations-on-march-15th/>

World Uyghur Congress. (2018). Press Release Thousands to Protest Against Mass Arbitrary Detention of Uyghurs on November 6th in Geneva Switzerland. Retrieved from World Uyghur Congress website:
<https://www.uyghurcongress.org/en/press-release-thousands-to-protest-against-the-mass-arbitrary-detention-of-uyghurs-in-internment-camps-other-serious-human-rights-violations-in-china-on-november-6th-in-geneva-switzerland/>

World Uyghur Congress. (2018). Uyghur Friendship Group Holds First Event in the European Parliament. Retrieved from World Uyghur Congress website:
<https://www.uyghurcongress.org/en/uyghur-friendship-group-holds-first-event-in-the-european-parliament/>

World Uyghur Congress. (2018). Weekly Brief September 14. Retrieved from
<https://www.uyghurcongress.org/en/?p=35748>

World Uyghur Congress. (2018). World Uyghur Congress Concludes Round-Table Discussion at the Nobel Peace Center in Oslo , Norway. Retrieved from World Uyghur Congress website:
<https://www.uyghurcongress.org/en/world-uyghur-congress-concludes-round-table-discussion-at-the-nobel-peace-center-in-oslo-norway/>

World Uyghur Congress. (2018). World Uyghur Congress Istanbul Youth Advocacy Training Workshop Concludes. Retrieved from
<https://www.uyghurcongress.org/en/world-uyghur-congress-istanbul-youth-advocacy-training-workshop-concludes/>

World Uyghur Congress. (2018). WUC to Hold Conference on “Religious Freedom and Cultural Values Under Siege” in Washington D.C. Retrieved from World Uyghur Congress website:
<https://www.uyghurcongress.org/en/wuc-to-hold-conference-on-religious-freedom-and-cultural-values-under-siege-in-washington-d-c/>

World Uyghur Congress. (2020). Affiliate Organizations.

World Uyghur Congress. (2020). World Uyghur Congress. Retrieved from
<https://www.uyghurcongress.org/en/>